

Annual Report Laporan Tahunan 2014



ANNUAL REPORT / LAPORAN TAHUNAN 2014

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM



KONTAK:
Badan Litbang SDM
Medan Merdeka Barat 9
Jakarta Pusat 10110
Telp. +62 21 381 0678
Fax. +62 21 381 0678
<http://balitbang.kominfo.co.id>



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia



KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurun waktu Tahun Anggaran 2014 yang diemban Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dijabarkan dalam Visi, Misi, Tujuan, serta sasaran program dan kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai perwujudan atas pelaksanaan amanat Peraturan Presiden 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014.

Laporan Tahunan 2014 ini menyajikan berbagai prestasi kerja sepanjang tahun 2014 pada masing-masing unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis yang dibagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan unit kerja.

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja dan pelayanan yang diberikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus meningkatkan kinerja demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Akhir kata, kami menyampaikan terimakasih kepada para *stakeholders*, pejabat dan seluruh staf di lingkungan Badan Litbang SDM yang dapat mewujudkan kinerja sangat baik sepanjang tahun 2014 sebagai dedikasi membawa kemajuan pada tahun 2014. Dan semoga Laporan Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2014 ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat serta bermanfaat bagi kejayaan bangsa.

Jakarta, Maret 2015

Kepala Badan

Basuki Yusuf Iskandar

DAFTAR ISI



BAB 1 03 IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

- 4 Ikhtisar Kinerja Keuangan
- 7 Visi dan Misi
- 8 Indikator Kinerja Utama
- 9 Tata Kelola Organisasi Yang Baik
- 10 Sumber Daya Manusia

BAB 2 13 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LITERASI DAN PROFESI

- 14 Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi
- 15 Hasil Penelitian Bidang Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi

BAB 3 17 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

- 18 Penelitian Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika

BAB 4 21 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

- 22 Profil Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Perangkat Pos Dan Informatika

BAB 5 25 PUSAT PENELITIAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 27 Profil Pusat Penelitian Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik

BAB 6 25 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

- 34 Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

BAB 7 37 DUKUNGAN MANAJEMEN

- 38 Dukungan Manajemen

BAB 8 37 UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

- 40 Profil UPT
- 41 Hasil Kegiatan Penelitian UPT Tahun 2014
- 41 BPPKI Manado
- 44 BPPKI Surabaya
- 47 BPPKI Yogyakarta
- 50 BPPKI Makassar

BAB 1

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

KOMININFO

IKTISAR KINERJA KEUANGAN

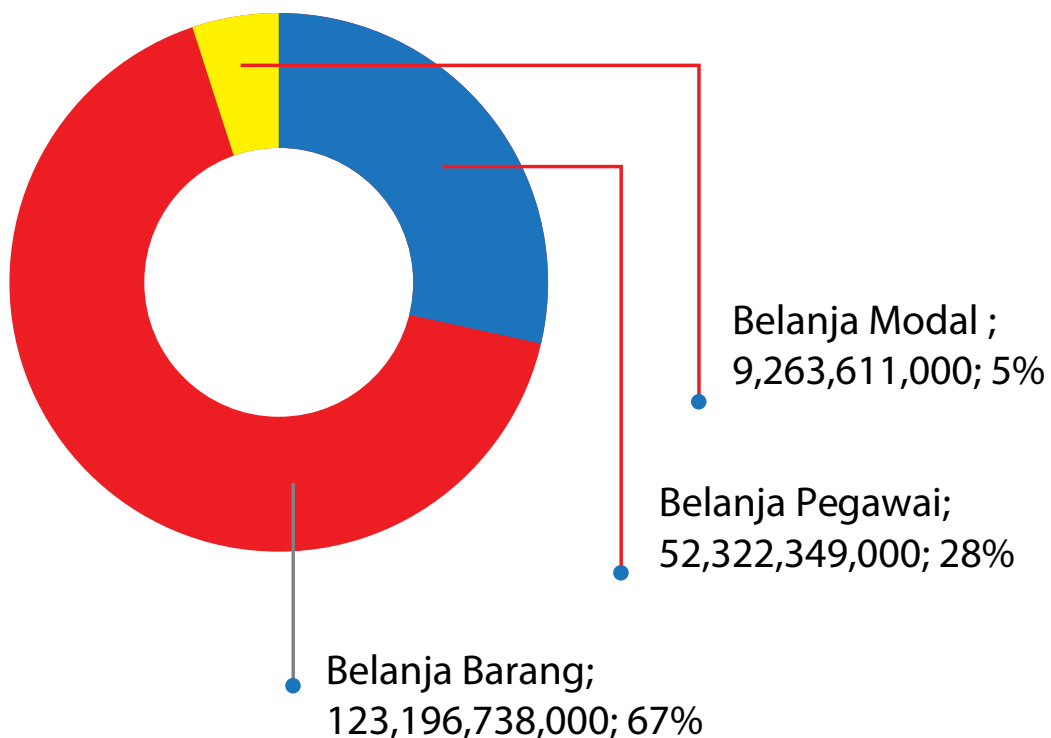
Pada tahun 2014 Badan Litbang SDM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 193.162.892.000,- (Seratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang terbagi dalam rupiah murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam dalam prosesnya beberapa kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran Badan Litbang SDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.782.698.000,- (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau menurun sebesar 4,34% dari anggaran semula.

Dari total pagu setelah revisi sebesar Rp. 184.782.698.000,- (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Badan Litbang SDM dapat merealisasikan dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan sebesar Rp. 166.869.926.507,- (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 90,31% dari total pagu anggaran setelah revisi.

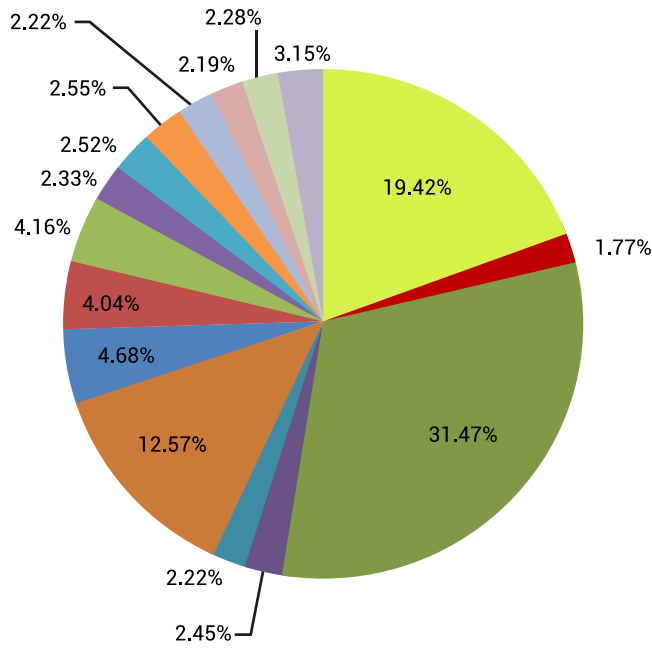
Kurang maksimalnya penggunaan anggaran pada Badan Litbang SDM salah satunya adalah disebabkan adanya kebijakan penghematan kegiatan di luar kantor dengan menggunakan fasilitas negara, sehingga rencana kegiatan yang sudah dianggarkan untuk diselenggarakan di gedung pertemuan dapat dihemat dengan biaya yang lebih kecil. Selain itu kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang telah direncanakan, juga tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan urgensi dan efisiensi.

Berikut ini disajikan grafis tingkat penggunaan anggaran di Badan Litbang SDM berdasarkan alokasi per satuan kerja.

Komposisi Anggaran Badan Litbang SDM TA 2014

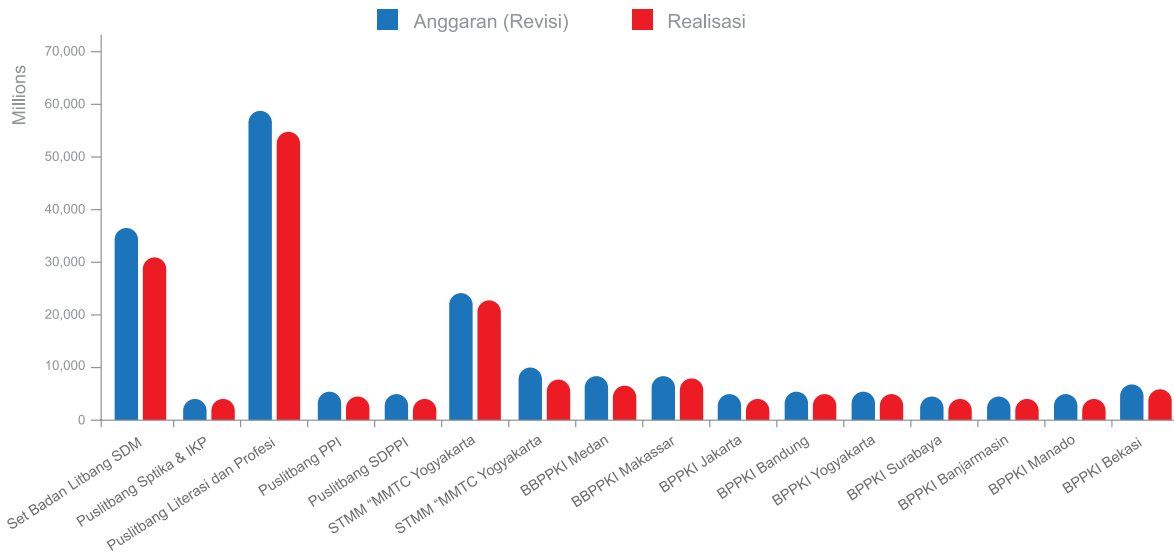


Komposisi Pagu (Revisi) per Satuan Kerja



- Set Bada Litbang SDM
- STMM "MMTC" Yogyakarta (RM)
- BBPPKI Bandung
- Puslitbang Aptika & IKP
- STMM "MMTC" Yogyakarta (PNBP)
- BBPPKI Yogyakarta
- Puslitbang Literasi dan Profesi
- BBPPKI Medan
- BBPPKI Surabaya
- Puslitbang PPI
- BBPPKI Makassar
- BBPPKI Banjarmasin
- Puslitbang SDPPI
- BBPPKI Jakarta

Anggaran VS Realisasi Badan Litbang SDM TA 2014





Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat dengan Badan Litbang SDM merupakan salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Badan Litbang SDM merupakan unsur penunjang Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki 2 (dua) peran penting yaitu pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika dan pelaksanaan pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informatika. Peran Badan Litbang SDM tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Litbang SDM baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana dalam pasal 626 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M. Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; sedangkan fungsinya adalah

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.



VISI DAN MISI



VISI

"Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang produktif dan terpercaya serta Sumber Daya Manusia yang profesional dalam membangun masyarakat informasi"

MISI

Visi Badan Litbang SDM dirumuskan dalam misi Badan Litbang SDM sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka penetapan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan literasi masyarakat dan profesionalisme SDM di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan daya saing;
- Membangun dan mengembangkan jaringan penelitian dan pengembangan serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan multi media yang profesional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas data hasil penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika di daerah untuk menuju masyarakat.





Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan matrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Berdasarkan Renja Badan Litbang SDM Tahun 2013, Indikator Kinerja Badan Litbang tahun 2013 adalah:

1. Meningkatnya karya-karya riset dalam bidang Kominfo yang bermanfaat dan terpercaya.
2. Meningkatnya pemanfaatan karya riset oleh masyarakat dan industri.
3. Meningkatnya hasil karya riset yang mengakomodasi kebutuhan konsumen.
4. Meningkatnya karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang Kominfo.
5. Berkembangnya TIK Nasional berbasis riset TIK
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah SDM Kominfo yang profesional sesuai kompetensi dan profesi bidang Kominfo.



TATA KELOLA ORGANISASI YANG BAIK



Asas Tata Kelola Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang baik (*Good Research and Human Resource Development Governance*) adalah sesuatu yang bersifat mendasar dan harus menjadi pedoman serta pola pikir bagi semua jajaran organisasi dalam melaksanakan setiap jenis dan aspek penelitian maupun pengembangan SDM. Menyadari nilai-nilai positif yang dapat diperoleh melalui penerapan *Good Research and Human Resource Development Governance* seluruh jajaran pimpinan Badan Litbang SDM senantiasa memperhatikan penerapan-penerapan prinsip-prinsip ***Good Research and Human Resource Development Governance*** yang sejalan dengan peraturan, praktik, kebijakan pemerintahan Republik Indonesia. Penerapan nilai-nilai tersebut bersifat menyeluruh, mulai dari perumusan judul penelitian, etika peneliti, kode etik kepegawaian, tata kelola organisasi, hingga fungsi dan unit-unit kerja organisasi.

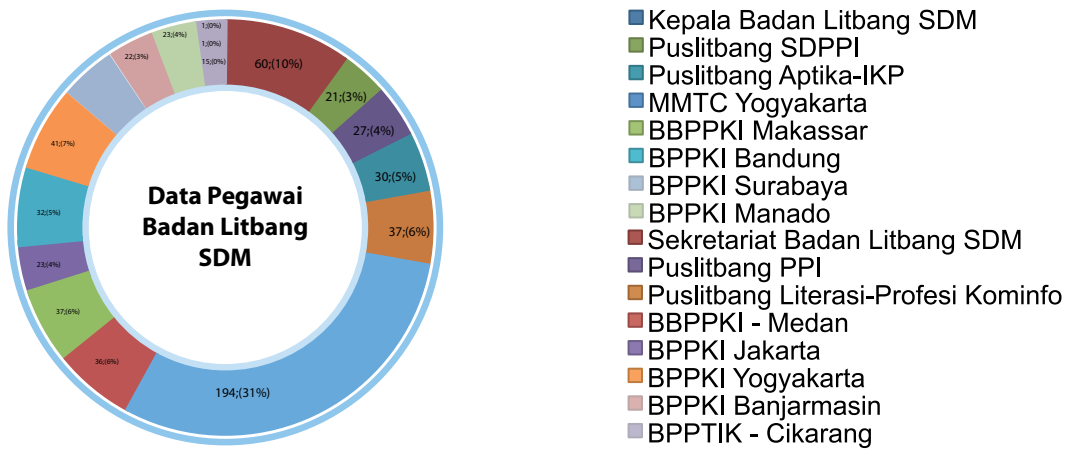
Penerapan Asas-Asas *Good Research and Human Resource Development Governance*

- **Transparansi**
Transparansi merupakan hal yang penting demi menjaga obyektifitas dalam menjalankan kegiatan dan memudahkan bagi para stakeholder dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Badan Litbang SDM senantiasa memastikan tersedianya hasil-hasil penelitian yang kredibel serta aspek pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat.
- **Akuntabilitas**
Akuntabilitas mengharuskan organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan, wajar, terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan SDM untuk menjaga akuntabilitasnya, antara lain tercermin dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada setiap jenjang organisasi, mulai dari jenjang eselon I hingga tingkat individu, sehingga memungkinkan organisasi untuk memonitor dan menyelaraskan setiap aktivitas organisasi dengan sasaran Kementerian. Di samping itu, secara rutin baik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pengawasan rutin terhadap setiap kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
- **Pertanggungjawaban**
Pertanggungjawaban mengharuskan organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga setiap hasil penelitian dan pengembangan SDM secara berkesinambungan untuk jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai lembaga penelitian yang profesional. Terkait dengan hal ini, Badan Litbang SDM secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian yang didasarkan pada kebutuhan Direktorat Jenderal teknis dan menitikberatkan pengembangan Sumber Daya Manusia pada sektor TIK.
- **Independensi**
Independensi mensyaratkan tidak adanya dominasi dan intervensi pihak lain terhadap organ organisasi, sehingga setiap hasil penelitian adalah merupakan hasil yang obyektif dengan metode penelitian yang tepat dan memadai. Diharapkan hasil penelitian yang diterbitkan dapat memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Teknis dalam menentukan kebijakan dalam bidang TIK di masa-masa mendatang.
- **Profesionalisme**
Dalam menjalankan setiap fungsi dalam organisasi, setiap individu secara sadar mengedepankan pelaksanaan detail proses dan optimalisasi hasil dalam menjalankan kinerja. Setiap individu memahami setiap tahapan dan arah pencapaian kinerja dengan mengacu kepada tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

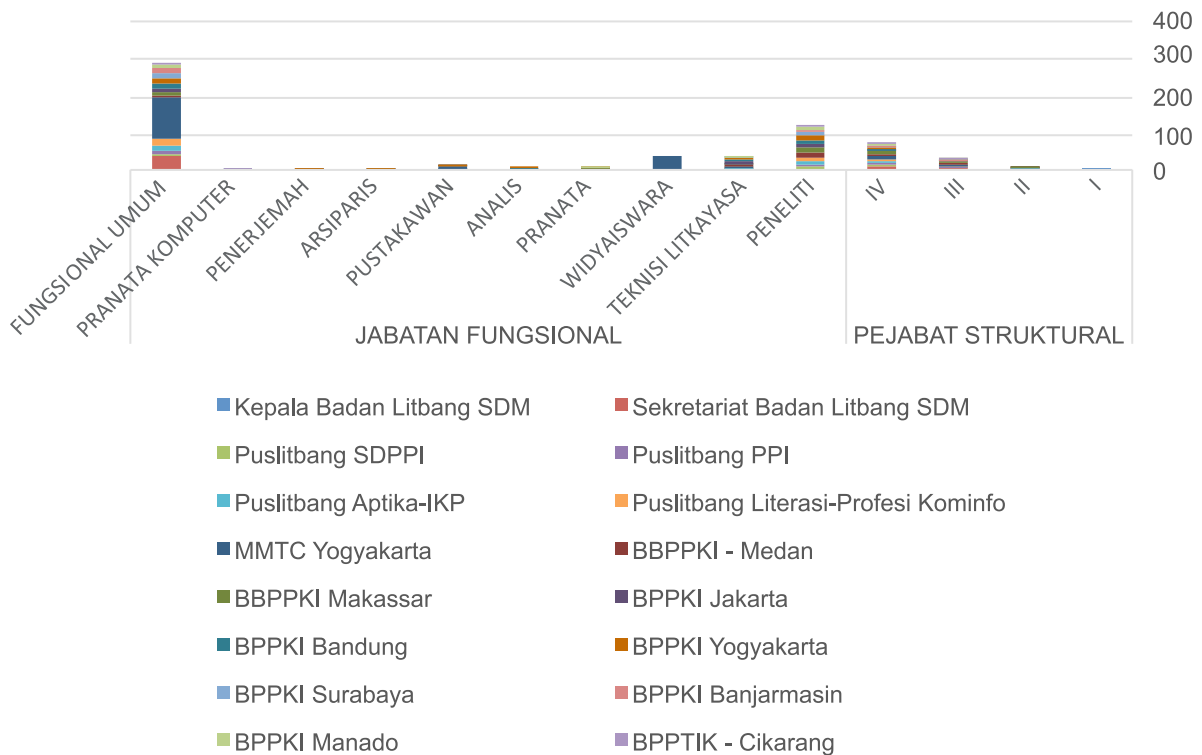
SUMBER DAYA MANUSIA

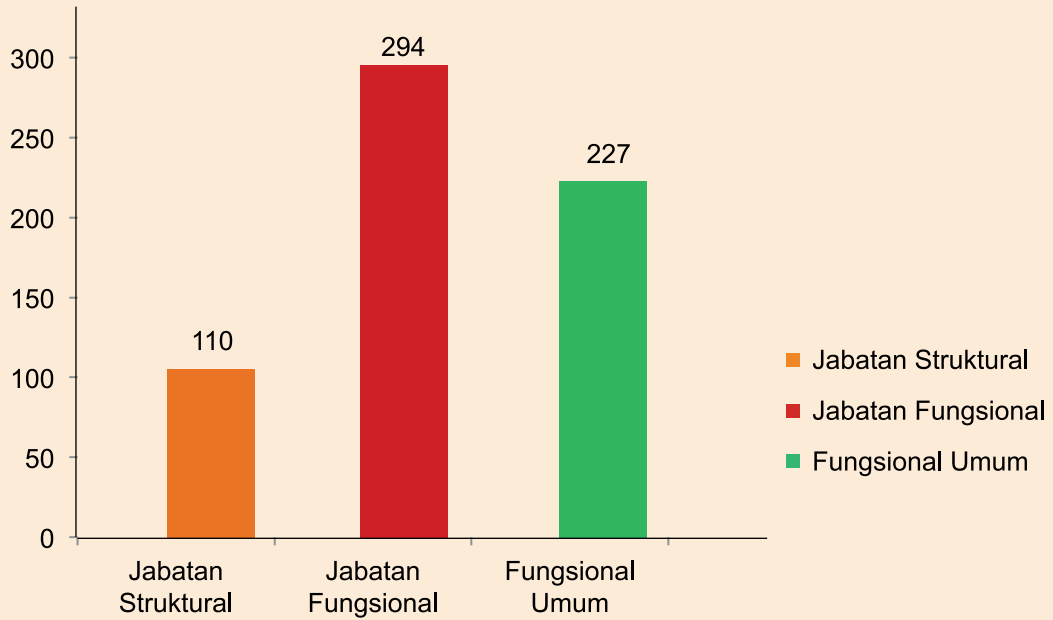
Dalam dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan SDM pada tahun 2014 didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan jumlah sebanyak 604 pegawai. Komposisi pegawai Badan Litbang SDM berdasarkan satuan kerja, jabatan, dan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Data Pegawai Badan Litbang SDM berdasarkan Satuan Kerja

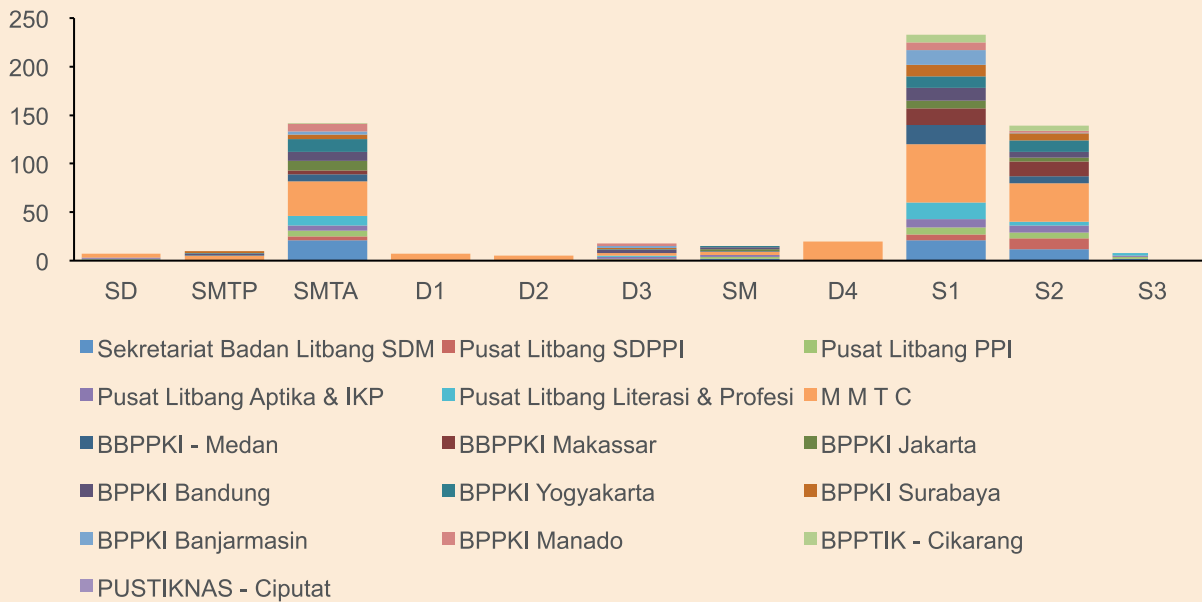


Data Pegawai Badan Litbang SDM Berdasarkan Jabatan

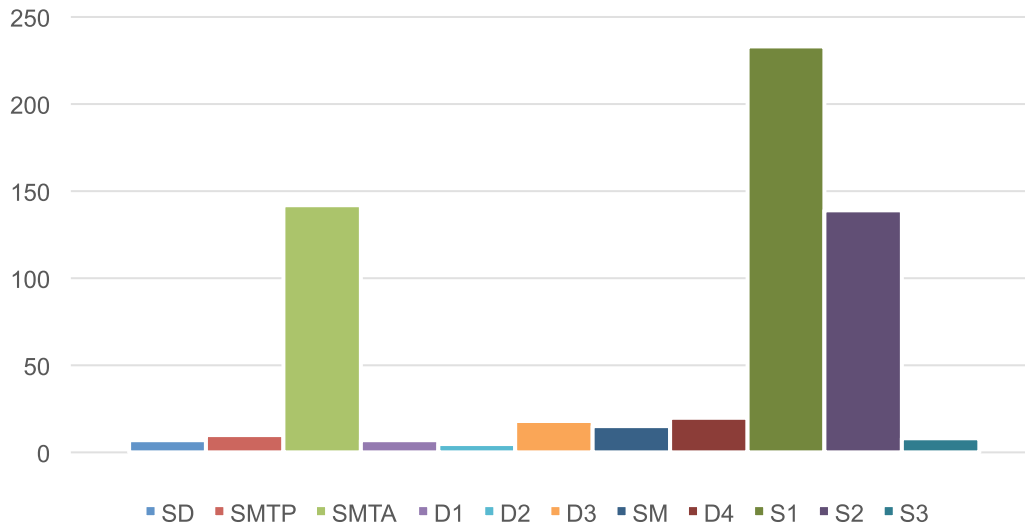




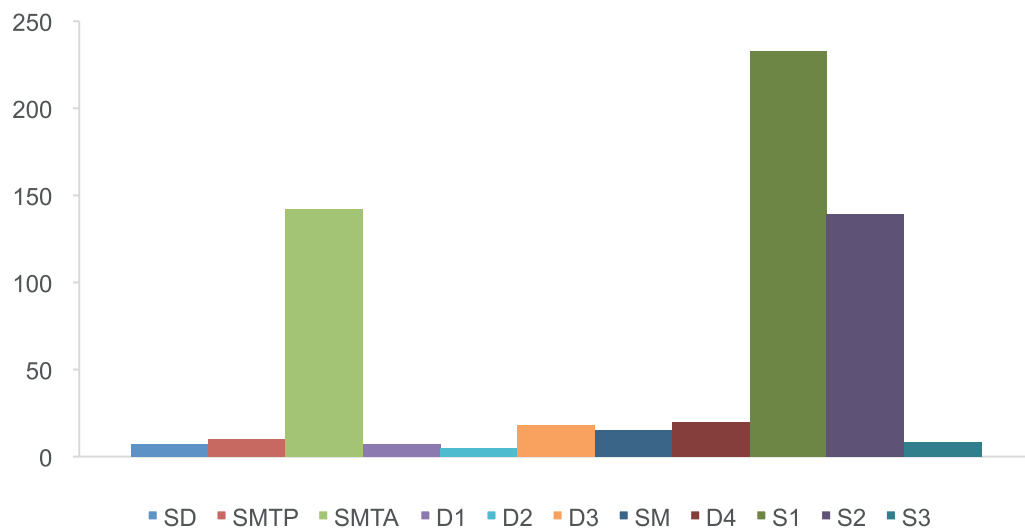
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



BAB 2

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN LITERASI DAN PROFESI

KOMINFO

Profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Literas Dan Profesi



Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi dan profesi komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Komunikasi dan Informatika (Puslitbang Literasi dan Profesi) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi dan profesi komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang literasi dan profesi komunikasi dan Informatika; dan
- c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian Bidang Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi

1. KAJIAN PASOKAN DAN PERMINTAAN (SUPPLY AND DEMMAND) SDM TIK DI BIDANG KOMINFO OLEH TIM PENELITI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LITERASI DAN PROFESI

Perbandingan jumlah pasokan SDM TIK dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang TIK menunjukkan kelebihan pasokan 79 %. Hal ini menunjukkan dari segi kuantitas, tenaga SDM TIK cukup melimpah, akan menimbulkan implikasi pada sulitnya penyerapan tenaga kerja. Untuk mendukung upaya penyerapan diperlukan peningkatan fasilitas kepada lulusan lembaga pendidikan untuk memiliki kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi profesi

2. STUDI PENGEMBANGAN DATABASE SDM TIK DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH OLEH TIM PENELITI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LITERASI DAN PROFESI

Database SDM TIK menyajikan profil SDM TIK dari aspek pendidikan dan pelatihan di bidang TIK, meliputi program kekhususan yang ditamatkan, jenis dan tingkat pelatihan/kursus yang pernah diikuti dan sertifikat yang diperoleh. Database SDM TIK bermanfaat dalam merancang jenis, bentuk dan tingkat pelatihan TIK yang akan dilaksanakan, agar terjadi link and match dengan kebutuhan instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga berdampak positif bagi peningkatan layanan masyarakat melalui implementasi e-government.



Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi juga menghasilkan beberapa penelitian dan modul pelatihan, diantaranya:

- Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sosial Dalam Diseminasi Informasi Publik Bagi Masyarakat Kota, Studi Kasus Kelompok Informasi Masyarakat di Kota Bandung
- Penelitian Persepsi Penonton Televisi Remaja di Wilayah Perbatasan Terhadap Negara Kesatuan RI, Studi Kasus *di Tanjungpinang dan Batam*
- Diseminasi Informasi Pemilu Melalui Televisi dan Keberhasilannya Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat
- Tanggapan dan Reaksi Khalayak Terhadap Siaran TVRI di Yogyakarta
- Studi Pengembangan SDM Industri Kreatif Kominfo, Kasus Komunitas Mobile Game Developer Indonesia
- Modul Bimbingan Teknis Budaya Dokumentasi
- Modul Bimbingan Teknis *Chief Information Officer (CIO)*



Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi juga menerbitkan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang telah memperoleh Akreditasi Majalah Ilmiah oleh LIPI sejak 2013.

BAB 3

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

KOMINFO

PROFIL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA BELUM ADA, BISA DI COPY DARI SUMBER SEBELUMNYA

1. STUDI PEMETAAN EKOSISTEM TIK DI INDONESIA OLEH TIM PENELITI PUSLITBANG PPI

Sektor TIK merupakan terpenting dari perekonomian suatu negara, tanpa dukungan pembangunan dan infrastruktur TIK, ekonomi masyarakat tidak berfungsi. Hal tersebut menjadikan kondisi ekosistem TIK menjadi faktor penting dalam pembangunan TIK secara keseluruhan. Penelitian pemetaan kondisi ekosistem TIK ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan model ekosistem TIK yang sesuai di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif. Model TIK ekosistem yang sesuai dengan kondisi di Indonesia ditentukan dengan *expert judgement*. Model ekosistem TIK yang paling mendekati dengan kondisi di Indonesia adalah "New ICT Ecosystem" (Prof Martin Fransman) dimana ekosistem TIK terbagi dari empat layer yaitu layer aplikasi dan konten, *converged network* (operator) dan *networked element* dan konsumen. Melalui kerangka model tersebut dilakukan pemetaan kondisi ekosistem TIK pada setiap layer-nya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan dalam ekosistem TIK di Indonesia masih terkotak-kotak serta perlu didorongnya simbiosis mutualisme antar masing-masing layer dalam ekosistem TIK di Indonesia

2. KAJIAN TENTANG KONSOLIDASI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI TIM PENELITI PUSLITBANG PPI

Kajian tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dari penyelenggara (operator) telekomunikasi seluler di Indonesia dilakukan untuk lebih menciptakan iklim yang sehat dan membangun perekonomian nasional dengan tentunya tidak merugikan pemain di sektor ini dan juga konsumen. Evaluasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu dalam RPM Kominfo tentang hal ini tidak perlu mengatur kembali apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang lain. Untuk itu koordinasi tata cara/prosedur penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antara instansi terkait perlu dilakukan. Berdasarkan kajian ini, disarankan yang perlu dilakukan oleh Kemkominfo/BRTI terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan penyelenggara telekomunikasi seluler diantaranya adalah penilaian pre-merger dan pengawasan post-merger yaitu melalui nilai perusahaan dan penilaian kelayakan (pre merger) dalam hal *Strategic and Business due diligence* (kecuali isu hukum persaingan usaha); *Technological & integration issues*; *Financial & commercial due diligence*



(kecuali isu hukum perusahaan); dan Public interest. Sementara itu Pengawasan post merger meliputi: Laporan berkala tentang pencapaian komitmen, Laporan berkala tentang kinerja dan Pengawasan terhadap kewajiban interkoneksi.

3. KAJIAN SKEMA STRATEGI PEMBANGUNAN DAN ASPEK PEMBIAYAAN FASILITAS PENDUKUNG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA (KAJIAN IMPLEMENTASI USO DI INDONESIA DAN KONSEP IDEAL TATA KELOLA SERTA PENGEMBANGANNYA) TIM PENELITI PUSLITBANG PPI

Implementasi USO di Indonesia yang telah dilakukan oleh BP3TI mengalami beberapa kendala dan permasalahan, yang secara garis besar meliputi aspek sustainability dan aspek pemanfaatan. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, kajian ini merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: (1) diperlukannya *Good Corporate Governance*, yang berfokus pada upaya perbaikan sistem SDM, sistem pengadaan/manajemen proyek, contract management, verifikasi asset/performance, sistem transfer aset dan juga public relation dengan stakeholder dengan terlebih dahulu menyelesaikan *blacklog* pembayaran dan masalah arbitrase; (2) Sebagai BLU, BPPPTI perlu mengidentifikasi peluang dan pengembangan produk (diversifikasi produk/ layanan) termasuk produk pendanaan (*financing*); (3) Perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana USO baik kepada masyarakat dan juga operator selaku kontributor dana USO; dan (4) Dalam rangka mendorong aspek pemanfaatan, maka perlu upaya untuk mendorong pengelolaan USO pada value for money dan pembangunan adaptive capacity masyarakat, misalnya melalui kustomisasi layanan/produk dengan didasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah.



4. FAKTOR-FAKTOR YANG MENPENGARUHI KONFLIK SOSIAL DAN MODEL RESOLUSI KOMUNIKASI DI JAWA BARAT OLEH RAMON KABAN (PUSLITBANG PPI), SUWANDI SUMARTIAS (UNIVERSITAS PADJADJARAN)

Minimnya rasa peduli, kesadaran, pemahaman, pengetahuan serta tanggung jawab anggota masyarakat dan para elite negeri (formal dan informal), maka potensi konflik sosial yang anarkis, senantiasa menjadi potensi dan bom waktu yang akan meledak setiap saat. Lemahnya pemetaan (mapping) sumber-sumber kekerasan sosial, belum termasuk kekerasan yang terjadi karena “ciptaan” para aktor dan atau oknum yang sering bermain-main dengan adanya

kepentingan tertentu dalam ranah kekuasaan, yang ingin selalu menciptakan suasana chaos dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terjadinya konflik sosial yang anarkis disebabkan adanya adanya peran media, perbedaan paham Islam dan aqidah Islam, eksklusivitas kelompok Ahmadiyah, peran pemerintah yang belum maksimal, paksaan terhadap kaum minoritas, kecemburuan sosial, pandangan negatif dan perbedaan kepentingan kelompok. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya konflik sosial yang anarkis antara lain Faktor Kebijakan Pemerintah, Faktor Kemunculan Provokator, Faktor Pemberitaan Media Massa.

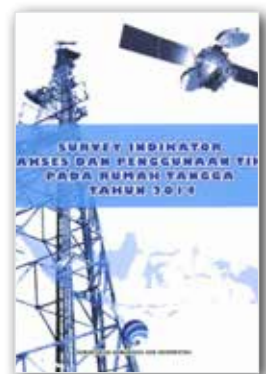
ICT White Paper Kominfo 2014 (Buku Putih Kominfo)

ICT White Paper disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk informasi terdokumentasi mengenai perkembangan TIK di Indonesia dan memahami arah pengembangan dan kebijakan serta pembangunan TIK yang telah dilakukan. Buku Putih Kominfo 2014 berfokus pada agenda pembangunan TIK diantaranya mengenai Rencana Pita Lebar Indonesia, infrastruktur dan penggunaan TIK serta *benchmarking* sebagai *positioning* pembangunan TIK Indonesia terhadap negara lainnya.



Survei Indikator Akses dan Penggunaan TIK di Kalangan Individu dan Rumah Tangga

Survei Indikator Akses dan Penggunaan TIK merupakan suatu upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memperoleh data dan informasi mengenai akses dan penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu dalam skala nasional. Survei mulai dilaksanakan sejak tahun 2009 meliputi data mengenai akses telepon genggam, telepon kabel, komputer, televisi, radio dan internet di 140 Kabupaten/ Kota pada 33 Provinsi di Indonesia dan selalu diperbaharui setiap tahunnya. Desain survei dikembangkan berdasarkan Indikator Pengukuran TIK yang digunakan International Telecommunication Union (ITU) dan telah diadopsi oleh berbagai negara. Survei ini menjadi vital karena merupakan referensi alternatif terhadap survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei internasional tentang indikator TIK di seluruh Indonesia.



BAB 4

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

KOMINFO

PROFIL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaksanakan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Puslitbang SDPPI) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, progam, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- c. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.





1. STUDI PEMETAAN INDUSTRI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI SELULER INDONESIA OLEH TIM PENELITI PUSLITBANG SDPPI I

Perkembangan telekomunikasi di Indonesia berkontribusi positif dan langsung terhadap penerimaan negara baik dari sisi APBN maupun PNPB. Namun jika dilihat dari sisi lain, perkembangan telekomunikasi menimbulkan defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh impor perangkat telekomunikasi yang relatif besar dibandingkan dengan penerimaan negara di sektor ini. Studi ini bertujuan memetakan Industri perangkat handset telekomunikasi seluler dilihat dari *value-chain* industri ini dan melihat potensi industri lokal dalam rangka mengurangi defisit tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan membangun model *value-chain* untuk industri perangkat handset seluler, studi ini menemukan bahwa peta *value chain* Industri di Indonesia sudah tergolong lengkap namun masih bertipe relational dimana ketergantungan kuat antara merk dan manufaktur. Studi ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diambil pemerintah untuk membangun industri perangkat handset telekomunikasi di Indonesia seperti skema insentif, regulasi Tingkat Kandungan dalam Negeri dan struktur *value-chain* yang perlu perubahan, sehingga dapat mengurangi defisit nilai perdagangan.

2. ANALISIS KEBUTUHAN SPEKTRUM FREKUENSI PPDR PITA LEBAR DI INDONESIA OLEH TIM PENELITI PUSLITBANG SDPPI II

Letak geografis dan kemajemukan masyarakat Indonesia menyebabkan Indonesia rawan terhadap bencana dan permasalahan sosial. Penanganan terhadap permasalahan bencana dan sosial oleh lembaga dan organisasi berwenang membutuhkan komunikasi yang intensif. Selama beberapa tahun terakhir, permintaan akan pengembangan aplikasi *Public Protection and Disaster Relief (PPDR)* terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk tanggap bencana yang lebih efisien dan efektif sehingga mendorong perkembangan teknologi broadband untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan tersebut. Di sisi lain, aplikasi *PPDR* yang ada saat ini kebanyakan berada pada pita sempit

yang mendukung aplikasi suara dan kecepatan data rendah, terutama di bandwidth kanal 25 kHz atau dibawahnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan frekuensi lembaga atau organisasi pemerintah terkait PPDR dengan menggunakan analisis berbasis kejadian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan spektrum frekuensi untuk menangani kejadian PP1 dan PP2 di Indonesia sebesar 2x10 MHz dan 2x20 MHz dengan menggunakan *LTE FDD*. Sedangkan untuk *LTE TDD*, kebutuhan spektrum frekuensi untuk menangani kejadian PP1 sebesar 20 MHz pada pita 400 MHz dan 15 MHz pada pita 800 MHz. Sedangkan, kebutuhan spektrum frekuensi untuk kejadian PP2 sebesar 30 MHz.

3. ANALISIS TEKNO-EKONOMI IMPLEMENTASI TEKNOLOGI LTE 1.8GHZ BAGI OPERATOR SELULER DI INDONESIA OLEH SRI ARIYANTI, DOAN PERDANA (UNIVERSITAS TELKOM)

Peningkatan kebutuhan layanan data mendorong operator telekomunikasi berusaha mengimplementasikan jaringan akses broadband yang lebih handal. Teknologi LTE merupakan salah satu teknologi dengan kecepatan mencapai tiga kali dibanding teknologi HSDPA, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan data mobile. Refarming frekuensi 1.8 GHz untuk penerapan teknologi LTE memberikan efisiensi karena tidak perlu membayar BHP lagi untuk menyewa frekuensi baru. Teknologi 2G GSM selama ini juga semakin ditinggalkan, masyarakat di daerah perkotaan cenderung lebih banyak menggunakan data. Sebelum diterapkannya teknologi LTE pada frekuensi 1.8 GHz perlu adanya kajian untuk mengetahui kelayakan teknologi LTE pada frekuensi 1.8 GHz. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan cost-benefit analysis implementasi LTE pada frekuensi 1.8 GHz. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimal bandwidth yang digunakan agar implementasi LTE layak digunakan yaitu 15 MHz. Meskipun tanpa Global Frequency Returning, penggunaan bandwidth 10 MHz tidak layak digunakan untuk implementasi LTE.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menerbitkan Jurnal Ilmiah Masyarakat Telematika dan Informasi serta Majalah Semi Populer MEDIAKOM. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Komunikasi dan Informasi Publik juga menghasilkan beberapa penelitian lainnya, diantaranya:

- Implementasi Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Pada Instansi Pemerintah
- Perancangan Strategis Manajemen Resiko Smart Grid Berbasis *Critical Information Infrastructure* Pada Smart Grid Ketenagalistrikan
- Kajian Tentang Urgensi Perlindungan Data Pribadi Bagi Pengguna Akses Informasi
- Kelembagaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik Dalam Ekosistem Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Program Tahunan Indonesia ICT Award (INAICTA) Dalam Menstimulus Pertumbuhan Industri Kreatif Digital
- Kecepatan Aksesn Informasi Pemanfaatan Warnet Desa Program Global Partnership on Based Aid (GPOBA) Di Kabupaten Garut
- Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan K-CLOUD di Kementerian Komunikasi Dan Informatika
- Analisis Tren Penyerangan Website Pemerintah Pada Tahun 2013



BAB 5

PUSAT PENELITIAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

KOMINFO



PROFIL PUSAT PENELITIAN APLIKASI INFORMATIKA DAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
- b. bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi
- d. informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.



HASIL PENELITIAN BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



1. PEMBERDAYAAN KIM BERBASIS TIK DI PERDESAAN

Sebanyak 3.413 KIM yang tercatat di Dirjen IKP Kominfo (2013) belum terkelola secara optimal. Padahal, ketika program pembangunan dimulai dari daerah (Nawa Cita, 2014-2019) KIM berbasis TIK memiliki potensi strategis untuk dikembangkan. Penelitian kualitatif yang mengambil kasus di 5 Provinsi ini bertujuan menggali konsep alternatif pengembangan KIM berbasis TIK, untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan. Hasil temuan penelitian menunjukkan: Pertama, mayoritas KIM di lokasi penelitian umumnya baru berfungsi sebagai media desiminator pengelolaan informasi (pemerintah) untuk penguatan pengetahuan masyarakat. Kedua, baru minoritas KIM berbasis TIK di lokasi penelitian yang berfungsi sebagai agen perubahan masyarakat, yang mengelola informasi sebagai sumber kapital sosial, dan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakat perdesaan. Berangkat dari kedua temuan empirik tersebut disarankan: (1) agar penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan membentuk KIM berbasis TIK yang berkonsep partisipatoris, di Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Di mana KIM berkonsep partisipatoris ini dapat dijadikan prototype model pengembangan

KIM berbasis TIK untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan. (2) Untuk peningkatan kualitas KIM berbasis TIK, ada baiknya dilakukan peninjauan kembali terhadap eksistensi (a) Permen No: 08/PER/M.KOMINFO/6/2010/ Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. (b) Permen No: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010/ Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kota. Di mana Fungsi TIK perlu diberikan penekanan khusus, bahkan jika mungkin diperlukan pembuatan Permen yang baru terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi pengembangan KIM berbasis TIK untuk pemberdayaan masyarakat di perdesaan.

2. KAJIAN PERAN SEKTOR TIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Kajian ini menyajikan hasil perhitungan matematis tentang peranan dan kontribusi langsung dari sektor TIK terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui beberapa indikator ekonomi: analisis pengganda dan analisis keterkaitan. Dengan melakukan perbandingan olahan data Input-Output antara tahun 2008 dengan 2010 serta analisis hingga tingkat daerah di Indonesia, diketahui bahwa kontribusi sektor TIK terhadap PDB



nasional, meningkat dari 2,9% pada 2008 menjadi 4,5% pada 2010. Namun sektor TIK masih didominasi oleh TIK Jasa dibanding manufaktur. Sektor TIK berkontribusi terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Provinsi di Indonesia melalui TIK Jasa, dan hanya 7 Provinsi yang tumbuh melalui TIK manufaktur, yaitu Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sektor TIK, khususnya TIK manufaktur cukup dominan dalam perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau.

3. IMPLEMENTASI TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PADA INSTANSI PEMERINTAH

Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pengelolaan informasi yang menggunakan Sistem Elektronik, maka setiap Penyelenggara Pelayanan Publik harus menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Dengan demikian, dibutuhkan penilaian terhadap kesiapan pada instansi Pemerintah sangat dibutuhkan agar kelak implementasi kebijakan dapat berlangsung efektif. Kajian ini dilakukan dengan analisis CFA (*Confirmatory Factor Analysis*) dan bertujuan untuk menggali dan

mengevaluasi penerapan tata kelola keamanan informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik pada instansi Pemerintah Provinsi untuk menghadapi adanya kebijakan pemerintah dalam penerapan tata kelola keamanan informasi.

4. PERANCANGAN STRATEGIS MANAJEMEN RESIKO SMART GRID BERBASIS CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE (STUDI KASUS PADA SMART GRID KETENAGALISTRIKAN)

Infrastruktur Smart grid merupakan salah satu infrastruktur kritis yang menggabungkan antara infrastruktur energi dan telekomunikasi serta jaringan internet. Dengan demikian, smart grid harus beroperasi dengan aman dan memenuhi aspek keamanan informasi. Penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada smart grid sebagai infrastruktur kritis ketenagalistrikan. Tujuan penelitian adalah memberikan masukan pada kebijakan pengamanan infrastruktur kritis berdasarkan studi kasus yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif yang mengkombinasikan hasil penilaian risiko pada obyek riset dengan pendapat pakar/praktisi. Hasil penelitian ini adalah masukan untuk kebijakan dan kerangka kerja pengamanan infrastruktur kritis.



BAB 6

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

KOMINFO

Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

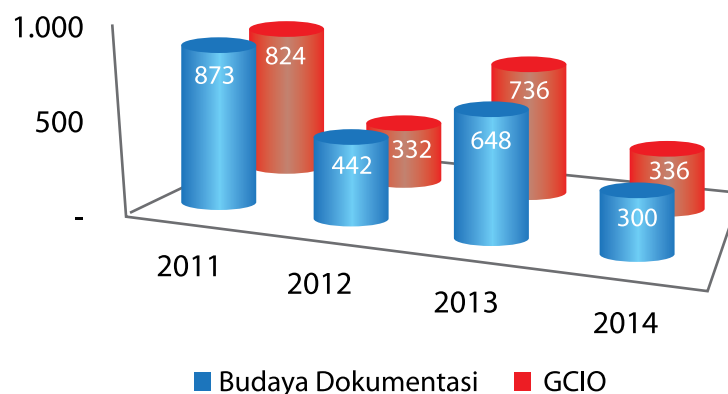
Sumber daya manusia merupakan titik sentral yang diperlukan dalam pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kementerian Kominfo menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk menjamin terciptanya SDM bidang kominfo yang kompeten dan kompetitif baik melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi bagi aparatur pemerintah.

Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Budaya Dokumentasi

Bimbingan Teknis Budaya Dokumentasi ini merupakan pelatihan yang ditujukan untuk memberikan kompetensi dasar atau kompetensi minimal kepada aparatur pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan TIK dan membantu penyediaan calon-calon pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di seluruh Indonesia sesuai dengan telah diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sejak Mei 2010. Pada tahun 2014, materi telah memasuki tingkat lanjutan dan dilaksanakan di enam lokasi dengan total 300 peserta dimana 210 peserta diantaranya berhasil memperoleh sertifikat sesuai dengan tingkatan sertifikasi yang diikuti.

Pelatihan dan Sertifikasi Government Chief Information Officer (GCIO)

Pelatihan CIO merupakan bagian dari usaha peningkatan literasi masyarakat melalui upaya peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan, pengendalian operasional serta evaluasi di bidang pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan E-Government, dan diatur menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola TIK dimana menyebutkan bahwa setiap institusi pemerintahan harus menetapkan *Chief Information Officer* (CIO) untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan. Pada tahun 2014, 138 dari 336 peserta memperoleh sertifikasi tingkat dasar ataupun tingkat lanjutan setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan di tujuh lokasi. Grafik di bawah menampilkan jumlah peserta Bimbingan Teknis dan sertifikasi Budaya Dokumentasi dan GCIO tahun 2011-2014.





Pengembangan Profesi bidang Komunikasi dan Informatika

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. SKKNI menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, tidak saja dalam perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan penempatan, serta penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan, tetapi juga dalam meningkatkan manajemen kinerja dan penilaian kompetensi, serta menetapkan bentuk dan besaran kompensasi bagi SDM bidang Kominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun Rancangan SKKNI bidang komunikasi dan informatika yang selanjutnya disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun empat Rancangan SKKNI yaitu *Enterprise Architecture Design*, Auditor Komunikasi, Pengarah Acara dan *Data Centre Management*. Selain itu, lima Rancangan SKKNI yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya telah disahkan menjadi SKKNI, yaitu Telekomunikasi, *ICT Project Management*, Periklanan, Produser TV dan Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket (Perposan). Dengan demikian, hingga 2014 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun 15 SKKNI dan 5 Rancangan SKKNI bidang komunikasi dan informatika.

RANCANGAN SKKNI DAN SKKNI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
No	SKKNI / RSKKNI	KETERANGAN	Tahun
1	Operator Komputer	KEP.94/MEN/IV/2005	2005
2	Programer Komputer	KEP.142/MEN/IV/2005 Updating: KEP.615/ 2012	2005
3	Computer Technical Support	KEP.272/MEN/VI/2006	2006
4	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi	KEP.269/MEN/VII/2006	2006
5	Multimedia	KEP.115/MEN/III/2007	2007
6	Kehumasan	KEP.39/MEN/II/2008	2008
7	Teknisi Telekomunikasi Satelit	KEP.114/MEN/VI/2008	2008
8	Desain Grafis	KEP.109/MEN/VI/2010	2010
9	Manajemen Layanan Teknologi Informasi	KEP.610 Tahun 2012	2012
10	Teknik (instalasi) Fiber Optik	KEP.717 Tahun 2012	2012
11	Telekomunikasi	KEP. 165 Tahun 2014	2014
12	<i>ICT Project Managemet</i>	KEP. 349 Tahun 2014	2014
13	Periklanan	KEP. 351 Tahun 2014	2014

RANCANGAN SKKNI DAN SKKNI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
No	SKKNI / RSKKNI	KETERANGAN	Tahun
14	Layanan Komunikasi Tertulis/Elektronik dan Paket (Perposan)	KEP. 354 Tahun 2014	2014
15	Produser TV	KEP. 352 Tahun 2014	2014
16	IT Security	Konvensi Tahun 2011 (ada Revisi)	2011
17	Auditor TI	Konvensi Tahun 2012 (Ada Revisi)	2012
18	Animasiw	Proses Pengesahan	2012
19	Data Centre Management	Proses Pengesahan	2014
20	Enterprise Architecture Design	Proses Pengesahan	2014
21	Auditor Komunikasi	Proses Pengesahan	2014
22	Pengarah Acara	Proses Pengesahan	2014

Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI

Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang kominfo, khususnya dalam Rencana Aksi Perluasan dan Penciptaan Lapangan Kerja bagi angkatan kerja muda, Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi sertifikasi nasional berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi angkatan kerja muda. Fasilitas Sertifikasi Berbasis SKKNI dilaksanakan di sepuluh lokasi dengan tingkat kelulusan 88% atau 639 dari 727 orang dan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang komunikasi dan Informatika.



Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI Bidang Keahlian Junior Programmer, Grafikka Administrator dan Junior Graphic Designer - Cikarang, 2014



Sertifikasi Kompetensi Berbasis SKKNI Bidang Keahlian Junior Multimedia dan Grafikka Fundamental - Yogyakarta 2014

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo merupakan upaya yang dilaksanakan Kementerian Kominfo dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia di bidang Kominfo melalui pemberlakuan sertifikasi berbasis SKKNI bagi para SDM bidang Kominfo serta upaya yang dilaksanakan pemerintah dalam memproteksi tenaga kerja lokal dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan dalam penyusunan RPM tersebut diantaranya melalui koordinasi dan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selain itu, Badan Litbang telah mengadakan sosialisasi dan uji publik terkait RPM Pemberlakuan SKKNI Bidang Kominfo dengan mengundang asosiasi-asosiasi di bidang kominfo, operator telekomunikasi, perusahaan bidang TIK dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Uji Publik dilaksanakan baik secara langsung maupun melalui media online dimana berbagai masukan telah diterima dan diakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan konsensus dari pelaku industri TIK pemberlakuan SKKNI bidang kominfo secara wajib adalah 1 Januari 2016.

Pelatihan dan Sertifikasi bidang TIK

Pelatihan TIK dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Bekasi dan Balai Pelatihan dan Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPRTIK/Pusat TIK Nasional) Ciputat meliputi pelatihan multimedia dan desain grafis, animasi, *web development*, *broadcasting*, jaringan, serta pelatihan TIK bagi disabilitas. Pelatihan diberikan baik kepada aparatur pemerintah maupun masyarakat diantaranya bagi para pelajar, mahasiswa, UMKM, disabilitas dengan total peserta 5.542 orang. Pelatihan diselenggarakan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Huawei, Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC), Korea International Cooperation Agency (KOICA), dan Pemerintah Daerah Bekasi.

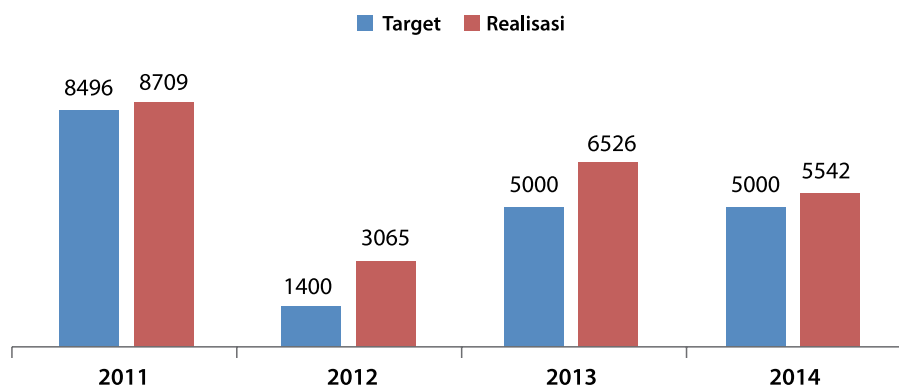


Pelatihan Jaringan dan Sys Admin - Ciputat 2014



Pelatihan dan Sertifikasi HCDA - Ciputat 2014

Jumlah Peserta Diklat Literasi Kominfo



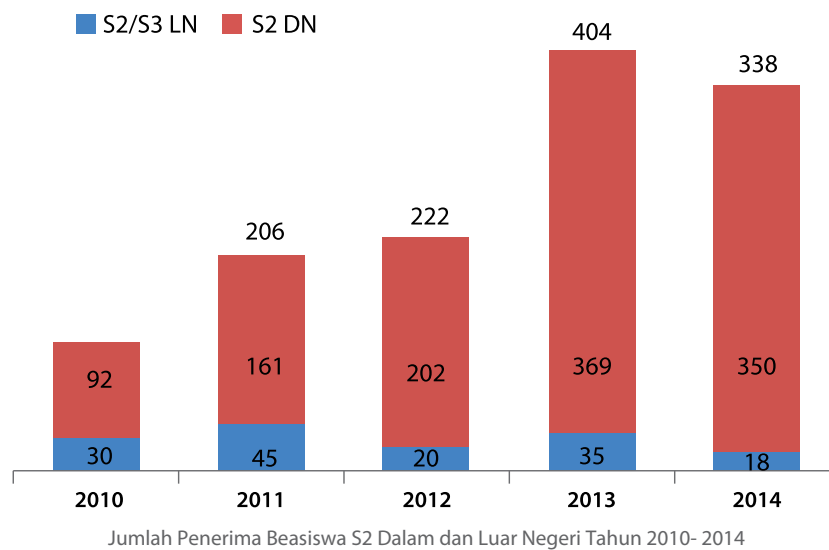
Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri

Program Beasiswa Dalam Negeri

Program Beasiswa S2 Dalam Negeri merupakan salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi aparatur Negara bidang komunikasi dan informatika. Program beasiswa ini diperuntukkan bagi aparatur pemerintah pusat dan daerah dengan jurusan bidang studi Magister CIO dan Magister Ilmu Komunikasi. Beasiswa diberikan bekerjasama dengan ITS, UI, UGM, ITB, UNP, Universitas Hasanuddin, USU, Universitas Andalas, Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, dan Universitas Syiah Kuala dimana pada tahun 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan beasiswa kepada 350 mahasiswa dengan total penerima beasiswa S2 Dalam Negeri tahun 2009-2014 sebanyak 1259 orang.



Program Beasiswa Luar Negeri



Program Beasiswa S2 Luar Negeri merupakan salah satu program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan kapabilitas dan daya saing SDM Indonesia di bidang komunikasi dan informatika sehingga dapat berperan sebagai agen-agen perubahan sosial di lingkungan masing-masing dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan visi Indonesia sebagai ASEAN ICT Leading Nation pada tahun 2015. Program beasiswa ini di peruntukkan bagi aparatur pemerintah, pegawai BUMN/BUMD dan Industri TIK serta masyarakat umum dengan jurusan komunikasi dan informatika serta bidang terkait TIK lainnya seperti *Cyber Law, e-Commerce, e-Business, Accounting and Financial Information System, Computer Science, Electronical Engineering, Communication, Journalism, Public Relations, Digital Media, New Media, dan Broadcasting*. Pada tahun 2014, 18 penerima beasiswa telah diberangkatkan ke beberapa Negara tujuan yaitu Belanda, Inggris, Jerman dan Jepang. Berikut merupakan diagram perkembangan jumlah penerima beasiswa dalam dan luar negeri tahun 2010-2014.



Pre-Departure Briefing dan Pelepasan Penerima Beasiswa S2 Luar Negeri Tahun 2014



Seminar dan Temu Alumni Beasiswa Kementerian Kominfo - Yogyakarta 2014

BAB 7

DUKUNGAN MANAJEMEN

KOMINFO

DUKUNGAN MANAJEMEN



Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
- b. bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi
- d. informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- e. pelaksanaan evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi.



RAPAT KOORDINASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2014

Rapat Koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2014 dilaksanakan di Padjadjaran Suites Hotel & Conference Bogor pada tanggal 1-3 April 2014 dengan tema *Peningkatan Kualitas dan Sinergitas Rencana Kerja Badan Litbang SDM Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Kemkominfo*. Acara dibuka oleh Kepala Badan Litbang SDM, Bapak Basuki Yusuf Iskandar dan dihadiri oleh para pejabat eselon II, III, IV, serta Kepala UPT di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM baik daerah maupun pusat. Turut hadir sebagai narasumber internal dan eksternal Kementerian Kominfo di antaranya Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Ibu Elly Fariani, Staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Bapak Henry Subiakto, Peneliti LIPI Bapak Ashwin Sasongko, Kepala Biro Keuangan Kementerian Kominfo Bapak Bambang Sigit Nugroho, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo Bapak Cecep Ahmad Feisal, Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara serta Pejabat Teknis Kedeputian Bidang SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui sambutannya, Kepala Badan Litbang SDM menekankan agar profesionalitas, koordinasi dan sinergitas dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika dikedepankan, terutama melalui penelitian, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak pada *regulatory trend* atau *economic trend* dan lebih jauhnya hingga dapat menciptakan produk-produk informatika. Rapat koordinasi juga membahas mengenai Rencana Kerja Badan Litbang SDM TA 2015, khususnya mengenai agenda penelitian Badan Litbang SDM ke depan, serta melakukan *review* terhadap hasil-hasil kinerja tahun sebelumnya dalam upaya mendukung pencapaian WTP oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terkait peningkatan kualitas penelitian Badan Litbang SDM, Rapat Koordinasi ini mengadakan agenda khusus yaitu kompetisi *Joint-Research* dimana para peneliti di lingkungan Badan Litbang SDM diundang untuk mengirimkan proposal penelitiannya yang dilaksanakan bersama dengan peneliti dari instansi eksternal seperti Perguruan Tinggi dimana penelitian terpilih akan memperoleh dana

TEMU ILMIAH PENELITI

Temu Ilmiah Peneliti merupakan agenda tahunan Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan seluruh peneliti dan fungsional pendukung. Di tahun 2014 ini, Temu Ilmiah Peneliti diselenggarakan di Hotel Sahid Rich, Yogyakarta, pada

tanggal 20-22 Agustus 2014. Dengan mengusung tema "Penguatan Kompetensi Peneliti Guna Meningkatkan Peran Badan Litbang SDM RPJM 2015-2019", Temu Ilmiah Peneliti 2014 menjadi ajang peningkatan kualitas dan peran peneliti untuk menghasilkan penelitian dan pengembangan yang berdaya guna bagi lembaga, industri, masyarakat, dan individu.

Temu Ilmiah dibuka oleh Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar, dan diikuti oleh para peneliti dan calon peneliti di lingkungan Badan Litbang SDM. Hadir pula Sekretaris Jenderal Kominfo, Suprawoto dan para praktisi serta akademisi diantaranya Dr. Lukito Edi Nugroho, Dr. Ana Nadya Abrar, Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI, Prof. Dr. Enny Sudarmonowati, anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset Peneliti LIPI, Prof. Dr. Erman Aminullah sebagai narasumber.

Agenda utama Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2014 adalah Kompetisi Karya Tulis Ilmiah (KTI) bidang TIK dan Bidang Komunikasi, berupa hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan para peneliti di lingkungan Badan Litbang SDM. Dalam kompetisi ini terdapat 23 KTI yang dipresentasikan para peneliti Badan Litbang SDM dengan Pemenang KTI Bidang TIK diperoleh oleh Kasmad Ariansyah dari Puslitbang SDPPI (Juara I), Yusrizal dari BBPPKI Medan (Juara II); dan Inasari Widiyastuti dari BPPKI Yogyakarta (Juara III). Sedangkan Pemenang KTI Bidang Komunikasi diperoleh oleh Karman dari BPPKI Jakarta (Juara I), Chriatiany Juditha dari BBPPKI Makassar (Juara II) dan Daru Nupikso dari BPPKI Yogyakarta (Juara III). Para Pemenang I Kompetisi KTI Bidang TIK dan Bidang Komunikasi diberikan apresiasi untuk melakukan workshop di Korea pada bulan Oktober 2014 serta diterbitkan dalam Prosiding Puslitbang Aptika dan IKP. Dalam Temu Ilmiah ini pula telah dilaksanakan Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Cabang Litbang Kominfo oleh Ketua Umum Himpenindo, Prof. Dr. Bambang Subyanto, dengan Ketua Himpenindo Cabang Litbang Kominfo Periode 2014-2019 adalah S. Arifianto, M.Si., Peneliti Utama dari Puslitbang Aptika dan IKP.

Pembinaan Sumber Daya Manusia Badan Litbang SDM

Pembinaan Sumber Daya Manusia di Alam Terbuka

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Pembinaan Sumber Daya Manusia di Alam Terbuka (*outbound*) pada tanggal 20-22 maret 2014 di Sari Ater *Hotel & Resort* Subang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kerjasama tim menuju peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi. Acara dibuka oleh Kepala Badan Litbang SDM, Bapak Basuki Yusuf Iskandar dan turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Kepala Biro Kepegawaian Kominfo, Kepala Biro Keuangan Kominfo, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, para pejabat eselon II dilingkungan

Badan Litbang SDM, Peneliti BPPT, tenaga medis Kementerian Kominfo serta para peserta yang berjumlah kurang lebih 270 orang yang berasal dari satuan kerja dan unit kerja dilingkungan Badan Litbang SDM dengan mayoritas peserta adalah Peneliti. *Outbound* ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kinerja Badan Litbang SDM terutama dalam hal penelitian, sehingga hasil penelitian dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan khususnya pada unit-unit kerja yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesi pembekalan dan peningkatan motivasi kerja diberikan oleh para narasumber yaitu Dr. Ashwin Sasongko dan Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Dr. Henri Subiakto.

Pembinaan Perilaku dan Mental Badan Litbang SDM

Pembinaan SDM dilaksanakan dalam rangka menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab pegawai dalam melakukan pekerjaan sampai selesai dan memberikan hasil yang optimal. Diharapkan kegiatan pembinaan dapat menciptakan kebiasaan dan perilaku pribadi yang baik serta menanamkan pola pikir yang baru pada pegawai di lingkungan Badan Litbang SDM. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, 22-24 Juli 2014 di Novotel Bogor dan diikuti oleh 230 peserta yang terdiri dari PNS dan non PNS yang ada dilingkungan Badan Litbang SDM. Dibuka oleh Kepala Badan Litbang, dalam arahnya Kepala Badan mengharapkin kinerja optimal dari seluruh jajaran di Lingkungan Badan Litbang SDM dan bertanggung jawab dalam memberikan yang terbaik untuk organisasi. Rangkaian kegiatan terdiri atas Buka Puasa Bersama, sholat tarawih berjamaah serta pembinaan mental dan perilaku oleh Tim Psikodinamika.

PRE-DEPARTURE BRIEFING BEASISWA S2 LUAR NEGERI TAHUN 2014

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Basuki Yusuf Iskandar, mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika, melepas keberangkatan 22 penerima beasiswa Program Beasiswa S2 Luar Negeri Tahun 2014 di Ruang Pertemuan Dr. H. Roeslan Abdul Gani Gedung utama Kementerian Kominfo pagi ini. Dalam sambutannya kepala Badan menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Beasiswa S2 Luar Negeri merupakan upaya untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika melalui pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Program Beasiswa S2 Luar Negeri yang diinisiasi pada tahun 2007 ini telah memberangkatkan 278 orang penerima beasiswa S2 dan S3 ke berbagai Negara tujuan studi, yaitu Australia, Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, Belanda dan Inggris. Para penerima beasiswa tersebut melanjutkan studi pascasarjana di bidang-bidang terkait komunikasi dan informatika, meliputi hukum, ekonomi, ilmu komunikasi, ilmu komputer, teknologi informasi, media dan penyiaran. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Bapak Suprawoto mewakili Menteri Komunikasi

dan Informatika memberikan MCIT Scholarship Award Letter, sertifikat pemberian beasiswa kepada perwakilan penerima beasiswa, Rizqi Hersyandika dan Maya Rismauly Hutapea, yang akan melanjutkan studi di Universiteit van Tilburg dan TU DELFT Belanda.

JOINT SPORTS DAY

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengadakan pertandingan persahabatan dengan Kedutaan Besar Korea Selatan Untuk Indonesia pada hari Selasa, 21 Januari 2014. Pertandingan diadakan di BPPTIK Cikarang dengan cabang olahraga yang dipertandingkan Bulu tangkis dan Tennis Meja. Turut berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan ini Menteri Kominfo, Bapak Tifatul Sembiring dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Mr. Kim Young Sun. Pertandingan persahabatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama Internasional dan Pengembangan SDM dengan Pemerintah Korea Selatan, acara ini juga dihadiri oleh beberapa Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Kementerian Kominfo, Staf Kedutaan Besar Korea Selatan, serta staf Khusus menteri Kominfo.



Naskah Akademis Strategi Pembangunan dan Forecasting Bidang Komunikasi dan Informatika 2015-2019

Naskah Akademis berisi gambaran dan kondisi sektor Komunikasi dan Informatika di Indonesia sehingga dapat menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada sektor Komunikasi dan Informatika dan Strategi pembangunan dan *forecasting* sektor Komunikasi dan Informatika di Indonesia tahun 2015-2019. Naskah disusun dengan tujuan untuk mendapatkan landasan yang akademis dan aktual untuk penyusunan rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 dimana visi RPJM 2015-2019 adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif dan perekonomian berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan Iptek”.







PENINGKATAN KUALITAS DAN SINERGITAS RENCANA KERJA
BADAN LITBANG SDM TAHUN 2015 DALAM BANGKA MEWUJUDKAN
VISI DAN MISI KEMKOMINFO
Bogor, 1 - 8 April 2014





BAB 8

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

KOMINFO



PROFIL UPT

Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon II

Badan Litbang SDM memiliki 3 (tiga) UPT setingkat Eselon II yaitu:

- Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) MMTTC**
 Sekolah Tinggi Multi Media didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media. Berdasarkan peraturan tersebut Sekolah Tinggi Multi Media menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Medan dan Makassar.**
 Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Medan dan Makassar, berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 07/PER.M/KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan.

Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III

Badan Litbang SDM memiliki 7 (tujuh) UPT setingkat Eselon III, 6 (enam) diantaranya melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika dan 1 (satu) melaksanakan pengembangan SDM. Adapun keenam UPT yang melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika adalah BPPKI Jakarta, BPPKI Bandung, BPPKI Yogyakarta, BPPKI Surabaya, BPPKI Banjarmasin dan BPPKI Manado. Tugas dan Fungsi dari ke-6 UPT tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER.M/KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika.

UPT setingkat Eselon III yang melaksanakan pengembangan SDM yaitu Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M.PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan Peraturan Menkominfo Nomor 07/PER.M.KOMINFO/03/2011 tanggal 16 Maret 2011, mempunyai tugas melaksanakan pelatihan (vocational training), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi.

Unit Pelaksana Teknis yang masih dalam Proses

Selain UPT yang telah ditetapkan status kelembagaannya tersebut terdapat 1 (satu) UPT Badan Litbang SDM yang masih dalam proses yaitu Pustiknas/BPPTIK di Ciputat, Tangerang Selatan. Adapun UPT tersebut melaksanakan pengembangan SDM.



HASIL KEGIATAN PENELITIAN UPT TAHUN 2014

BPPKI MANADO

1. STUDI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DAERAH PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD OLEH ARSYAD & RIVA'ATUL ADANIAH WAHAB

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implementasi *e-government* di masing-masing pemerintah daerah. Otoritas untuk menentukan konsep *e-government* menjadikan masing-masing daerah memiliki tingkat kemajuan implementasi *e-government* yang berbeda. Kesenjangan pada umumnya rentan terlihat di daerah perbatasan. Seiring dengan permasalahan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang datang bertubi-tubi. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini semakin tinggi. Dalam hal ini, penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah solusinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik sebagai salah satu wujud *good governance*. Karenanya, penelitian implementasi *e-government* perlu dilakukan di daerah perbatasan dalam rangka mendorong pemerataan implementasi *e-government* di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif survei deskriptif dengan wawancara terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi *e-government* di kabupaten kepulauan talaud sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di kabupaten kepulauan talaud masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan. Proses dalam implementasinya pun masih dilakukan secara parsial atau sektoral di masing-masing skpd. Dalam kondisi ini, model *connected government* dapat diterapkan sebagai solusinya.

Simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-government* di kabupaten kepulauan talaud masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan. Dalam implementasi *e-government* di daerah ini, komitmen kepala daerah yang diwujudkan dalam *mindset e-leadership* merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Adapun faktor yang dapat menghambat implementasinya antara lain kondisi infrastruktur tik yang masih minim. Terkait konsep *e-government*, model *connected government* dapat diterapkan dalam implementasi *e-government* di kabupaten kepulauan talaud. Model tersebut dapat diadaptasi dalam berbagai bentuk antara lain pengintegrasian *database* pemerintahan seperti kependudukan atau kepegawaian, *e-budgeting* untuk mengakomodir perencanaan keuangan dan *e-project planning* untuk perencanaan pembangunan, dan sistem perkantoran elektronik seperti kantor maya (kantaya).

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan terkait implementasi *e-government* di Kabupaten Kepulauan Talaud secara khusus dan daerah perbatasan secara umum antara lain 1) Realisasi program pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur TIK di wilayah perbatasan seperti Palapa Ring harus disegerakan dalam rangka percepatan implementasi *e-government* yang lebih baik, 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* bidang kominfo perlu merumuskan kebijakan pembangunan jaringan TIK untuk kasus khusus/tertentu, misalnya *trace root* di daerah perbatasan, 3) Fokus investasi pihak swasta terutama yang menyediakan infrastruktur TIK perlu didorong untuk mengarah kepada daerah perbatasan, dan 4) Direktorat *e-Government* Dirjen APTIKA Kemkominfo perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin implementasi *e-government* di daerah perbatasan dalam rangka mempercepat pemerataan implementasi *e-government* di Indonesia.

2. TATA KELOLA PERENCANAAN SISTEM TIK PADA DINAS KOMINFO KOTA BITUNG OLEH BAHRAWI

Implementasi *good governance* akan menjamin transparansi, efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Disisi lain intensitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus meningkat, peningkatan tersebut semestinya diiringi juga dengan peningkatan kinerja pemerintah, salah satu komponen yang cukup penting adalah pengelolaan perencanaan sistem TIK. Perencanaan sistem TIK yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap organisasi, hal tersebut membutuhkan pengelolaan perencanaan sistem TIK. Tata kelola untuk perencanaan sistem TIK adalah merupakan salah satu dari beberapa point penting mengenai tata kelola TIK. Indonesia telah memiliki panduan tata kelola TIK yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kominfo No.41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional. Panduan tersebut memuat hal-hal mengenai proses perencanaan sistem TIK. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, instrumen yang diadaptasi dari Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional serta teknik analisis data yang diadopsi dari *Cobit Maturity level*, penelitian ini mencoba mengeksplorasi panduan tersebut untuk kemudian digunakan sebagai *tools* evaluasi tata kelola perencanaan sistem TIK terhadap salah satu instansi pemerintah yaitu Dinas Kominfo Kota Bitung. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Dinas Kominfo Kota Bitung dari sisi tata kelola perencanaan sistem TIK masih berada pada level rendah yaitu level 1 dengan nilai tingkat kematangan sebesar 0.63

Penelitian ini memanfaatkan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Permen Kominfo No.41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional sebagai dasar dalam mengevaluasi penerapan tata kelola TIK di Dinas Kominfo Kota Bitung. Sebagai simpulan sementara meskipun belum terdapat bukti hasil penelitian khusus terkait Permen Kominfo no.41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum TIK Nasional, namun penulis beranggapan bahwa Permen tersebut membutuhkan perbaikan atau tambahan materi, namun ini akan diperdalam lagi dalam bentuk penelitian khusus terhadap Permen tersebut pada kesempatan-kesempatan berikutnya.

Berikut beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini :

Arsitektur Informasi (AI), Alur proses informasi serta penggunaan alat teknis pendukungnya perlu distandarisasi dan didokumentasikan lalu kemudian disosialisasikan terhadap pengguna informasi. Arsitektur informasi dibuat untuk Dinas Kominfo Kota Bitung saja dulu tanpa harus menunggu kesiapan dari SKPD lainnya.

Arsitektur Aplikasi, untuk jangka pendek sesuai dengan kondisi saat ini, arsitektur aplikasi memang masih boleh ditunda mengingat banyaknya hal yang utama yang juga masih belum terpenuhi. Namun untuk jangka panjang, dari segi efisiensi perancangan aplikasi domain ini merupakan bagian yang cukup penting dimasa mendatang

Arsitektur Infrastruktur Teknologi, pembagian tugas serta tanggung jawab untuk infrastruktur teknologi baik pengembangan ataupun pemeliharannya harus jelas dan tegas, diperlukan adanya instruksi dari *top* manajemen yang menyatakan dengan tegas bahwa infrastruktur teknologi dikelola oleh Dinas Kominfo ataukah dikelola masing-masing SKPD yang ada. Mengingat terbatasnya SDM dibidang teknologi maka perlu dipertimbangkan untuk bekerja sama dengan penyedia jasa pengembang infrastruktur teknologi yang profesional.

Rekomendasi Manajemen dan Organisasi, dibentuk tim khusus yang bertugas khusus untuk pengelolaan manajemen sistem, diberi pelatihan dan dievaluasi secara terus menerus. Membuat standar operasional prosedur (SOP) pada setiap bagian sistem yang membutuhkan interaksi dengan pengguna sistem.

Pendekatan dan Roadmap Implementasi, memberikan pelatihan manajemen proyek terhadap staf yang ditugaskan untuk menangani proyek-proyek IT, membuat rencana strategis khusus untuk pengembangan sistem TIK rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

3. PERAN WEBSITE PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM Mendukung Terwujudnya Good Governance

Komitmen Pemerintah Kota Manado untuk menerapkan pelayanan prima dan sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat direalisasikan dalam website yang mereka kelola di www.manadokota.go.id. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran website pemerintah kota Manado dalam mendukung terwujudnya *Good Governance*. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung pada website serta hasil interview, dan data sekunder adalah literatur penelitian terkait.

Hasil penelitian mengungkapkan website Pemerintah Kota Manado telah menunjukkan perannya untuk mendukung tercapainya *Good Governance*. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi dan akuntabilitas dapat dirasakan pengunjung website meskipun belum maksimal. Masyarakat, walaupun terbatas sudah dapat aktif berpartisipasi dalam

memberikan masukan, keluhan, dan saran sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat eksekutif. Satu yang kurang dirasakan adalah prinsip supremasi hukum, dimana Pemerintah Kota Manado belum memanfaatkan website untuk mempublikasikan produk hukum Pemerintah terutama yang berkaitan dengan masyarakat.

4. PEMANFAATAN JEJARING SOSIAL DI SKPD KOTA TAHUNA OLEH FEMY F UMBOH DAN JOHANIS M. TAMBURIAN

Pemanfaatan Jejaring Sosial dapat membantu tugas dan fungsi Pegawai Pemerintah khususnya bagi SKPD Kota Tahuna dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, namun sering kali di dapati banyak pegawai yang hanya menggunakan internet lebih kepada kepentingan pribadi mereka, antara lain hanya bermain game, browsing google dengan informasi selebritis, kemudian juga membuka jejaring sosial seperti facebook, twitter dan lain-lain. Pada hal apabila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil yang pada intinya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, baik itu pelayanan informasi maupun birokrasi. Karena itu focus penelitian ini adalah pada Pemanfaatan Internet/Jejaring Sosial dalam Menjalankan Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari latar belakang tersebut maka masalah yang akan digali adalah; Bagaimana Pemanfaatan jejaring sosial bagi PNS, dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan jejaring sosial bagi PNS di Kota Tahuna. Sedangkan Tujuan; Untuk mengetahui Pemanfaatan jejaring sosial bagi PNS, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan jejaring sosial bagi PNS di Kota Tahuna.

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan populasi dalam penelitian ini adalah semua PNS yang ada di lingkungan kantor SKPD di Kota Tahuna. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat Pendidikan Sarjana/S1 paling dominan merespon jejaring sosial tersebut, sedangkan menyangkut Jabatan responden paling dominan adalah Kelompok Fungsional/ Stafpelaksana.

5. IMPLEMENTASI UU KIP PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO OLEH NDOHEBA KENDA DAN RATNA WIDYASTUTI

Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai badan publik telah melaksanakan tatakelola pemerintahan, dan menjabarkan UU KIP dengan pembentukan PPID dan KI sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam pelayanan informasi publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi UU KIP, faktor-faktor pendorong dan hambatan penerapannya dalam jenis

penelitian kualitatif deskriptif, pengumpulan datanya dengan triangulasi. Secara umum tata kerja dan kelola pemerintahan Provinsi Gorontalo meningkat dari waktu ke waktu, memperoleh peringkat nasional kedelapan tahun 2012 dan keempat tahun 2013 untuk penerapan *e-gov*, yang telah menerapkan kebijakan G2C. Untuk pemberdayaan dan pemanfaatannya PPID, belum berjalan sebagaimana mestinya terkait pengelolaan dan operasionalnya. Pendorong implementasi UU KIP yakni; proaktifnya media massa lokal, serta tumbuhnya budaya *pobibilio* pada masyarakat lokal. Kendalanya; PPID, terdapat kelemahan pada komitmen, koordinasi antar lembaga, minimnya *update* informasi SKPD di *website*, masih kurangnya SDM-TIK di SKPD, sosialisasi dan belum siapnya dukungan APBD untuk *supporting* implementasi UU KIP. Kesimpulannya, pemerintah Provinsi Gorontalo dengan www.gorontaloprov.go.id sebagai kebijakan G2C telah berlangsung sebelum UU KIP dilaksanakan, proaktifnya media massa dan budaya lokal sebagai faktor pendorong. PPID belum fokus, dan masih bersifat egosekoral di masing-masing SKPD. komitmen, koordinasi, kurangnya SDM-TIK dan sosialisasi serta dukungan APBD butuh penguatan untuk implementasi UU KIP lebih lanjut. Kata kunci: Implementasi, UU KIP, Pemerintah Provinsi Gorontalo

6. PENGGUNAAN ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA SISTEM NAVIGASI DAN KOMUNIKASI AKTIVITAS PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN BITUNG OLEH RIVA'ATUL ADANIAH WAHAB

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat dimanifestasikan melalui penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan. Pemanfaatan ini merupakan upaya peningkatan performansi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pelaku aktivitas perikanan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan pengumpulan data wawancara mendalam ini bertujuan mengetahui sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung, khususnya alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasionalisasi sistem navigasi dan komunikasi aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Bitung masih kurang optimal dimana sistem berjalan secara parsial. Alat dan perangkat yang digunakan juga tidak memadai sehingga mengakibatkan terjadinya keterbatasan dan saling tumpang tindih dalam perolehan informasi. Kondisi ini juga berdampak kurang efisien dan optimalnya penggalian pemanfaatan sumber daya perikanan di lautan Indonesia. Karenanya perlu dilakukan pengoptimalisasian penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi melalui pengintegrasian sistem navigasi dan komunikasi. Penambahan alat dan perangkat telekomunikasi misalnya pengadaan bantuan alat telekomunikasi seperti HF *Tranceiver*/HF HT di Pelabuhan Perikanan Bitung juga perlu dilakukan oleh pemerintah.

7. KESIAPAN PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOTA BITUNG OLEH SYAMSIAH AMALI

Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas menjadi penting untuk diimplementasikan di semua Badan Publik dengan pembentukan PPID sebagai pengelolaannya. Dan di Diskominfo kota Bitung baru terbentuk PPID tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PPID Dinas Komunikasi Informatika dalam pelayanan informasi publik di kota Bitung. Pendekatan penelitian ini secara kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa : kesiapan PPID Diskominfo dalam pelayanan informasi publik di kota Bitung masih terbatas dan belum memadai, baik dari sarana, prasarana serta SDM.

Hambatan/kendala anggaran, sarana, prasarana dan SDM yang masih terbatas. Namun upaya-upaya terus dilakukan oleh Diskominfo untuk meningkatkan pelayanan Informasi Publik

8. SURVEI AKSES DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI OLEH RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU DI WILAYAH KERJA BPPKI MANADO.

Indikator dirancang untuk merepresentasikan dan menyediakan informasi kuantitatif tentang suatu hal tertentu yang menarik, salah satunya adalah indikator TIK oleh rumah tangga dan individu. Di Indonesia, indikator ini disusun untuk mengetahui tingkat akses dan penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu Indonesia. Agar data akses dan penggunaan TIK oleh rumah tangga dan individu Indonesia dapat disusun, dilengkapi, dan dimutakhirkan secara rutin serta berkelanjutan, perlu dilakukan survei secara nasional di seluruh wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh Balai-balai penelitian sebagai UPT di bawah naungan Badan Litbang SDM Kemkominfo, termasuk BPPKI Manado sebagai salah satu UPT daerah. Survei ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa TIK yang paling dominan dimiliki dan digunakan responden di wilayah kerja BPPKI Manado adalah TV dan yang paling sedikit adalah telepon kabel. Familiarnya jenis TIK seperti TV diprediksi menjadi alasan tingginya kepemilikan dan penggunaannya di masyarakat. Karenanya, Direktorat Penyiaran Dirjen PPI Kemkominfo beserta stakeholder (KPI dan lainnya) hendaknya melakukan pengawasan secara ketat terhadap konten siaran TV terutama di jam siaran yang digemari masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan manfaat positif dari konten siaran TV yang disajikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa TIK yang paling dominan dimiliki dan digunakan responden di wilayah kerja BPPKI Manado adalah TV dan yang paling sedikit adalah telepon kabel. Familiarnya jenis TIK seperti TV

diprediksi menjadi alasan tingginya kepemilikan dan penggunaannya di masyarakat. Adapun Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan tingkat kepemilikan dan penggunaan radio yang paling rendah sedangkan Provinsi Gorontalo adalah provinsi dengan tingkat kepemilikan dan penggunaan komputer serta Internet yang paling rendah. Berdasarkan hasil survei juga diketahui bahwa selain faktor kebutuhan, faktor *social influence* dan *facilitating conditions* (teori UTAUT) juga dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan TIK. Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil survei yang diperoleh antara lain 1) Direktorat Penyiaran Dirjen PPI Kemkominfo beserta stakeholder (KPI dan lainnya) hendaknya melakukan pengawasan secara ketat terhadap konten siaran TV terutama di jam siaran yang digemari masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh informasi dan manfaat positif dari konten siaran TV yang disajikan, 2) Dalam rangka mewujudkan Indonesia *connected*, pengadaan infrastruktur Internet sangat diperlukan di beberapa daerah khususnya di daerah yang tergolong rural dan tidak menguntungkan secara ekonomi, serta 3) Daerah dengan tingkat kepemilikan atau akses dan penggunaan TIK yang paling rendah perlu mendapat perhatian khusus dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama TIK seperti hp, komputer, dan Internet agar terjadi pemerataan serta konektivitas akses dan penggunaan TIK di seluruh Indonesia.

BPPKI SURABAYA

1. IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KIP OLEH PEMDA (Evaluasi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Oleh Pemerintah Daerah) di Jawa Timur, NTB dan Sulbar Oleh: Trisnani

Tulisan ini menyajikan data dan informasi mengenai hasil penelitian tentang Evaluasi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Oleh Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan pada bulan Mei, lokasi di Jawa Timur, NTB dan Sulbar sebanyak 452 responden dengan metode diskriptif kuantitatif, permasalahan yang dimunculkan Sejauh manakah evaluasi implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pemda hasilnya rata-rata masyarakat telah mengetahui undang-undang keterbukaan informasi publik namun belum memahami isi yang termaktup dalam undang-undang nomor 14 th 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena belum disosialisasikan secara maksimal Tetapi dengan terbitnya UU tersebut disambut positif, oleh masyarakat, keterbukaan informasi publik bisa sebagai sarana pengoptimalan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan bisa sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir keamanan keuangan negara. Yang saat ini banyak dilakukan oleh pejabat negara, Realitas yang berkembang di masyarakat saat ini, bahwa koruptor adalah orang-orang yang sudah dikenal baik di masyarakat, apabila seluruh masyarakat menghayati Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik maka terbentuknya *good governance* yang baik dapat tercapai. Prinsip-prinsip *good governance* yang

paling pokok antara lain transparansi dan akuntabilitas, kalau seluruh bangsa ini memegang teguh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, akan bisa menekan masalah-masalah penyimpangan termasuk didalamnya korupsi.

2. APRESIASI MASYARAKAT SURABAYA TERHADAP REGISTRASI NOMOR HANDPHONE oleh Wahyudiono

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, bulan Mei 2014 mengeluarkan surat edaran kepada operator telekomunikasi untuk menata ulang registrasi kartu telepon. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penilaian masyarakat terhadap kewajiban registrasi kartu telepon? Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan metode-metode survei. Hasil penelitian menunjukkan, responden yang meregistrasi kartu telepon yang dimilikinya dengan identitas yang tidak sesuai, jumlahnya cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah responden membeli kartu telepon dalam kondisi sudah aktif yang berarti registrasi dilakukan oleh penjual kartu dengan identitas palsu

3. PEMANFAATAN BROADBAND LEARNING CENTER (BLC) DI SURABAYA

Surabaya sebagai kota besar merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran program Indonesia Digital Creative dari PT. Telkom, salah satu programnya yaitu Broadband Learning Center. Broadband Learning Center diharapkan mampu membuat warga Surabaya dapat dengan mudah mengakses perangkat ICT yang disediakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Broadband Learning Center (BLC) oleh masyarakat terutama di Kota Surabaya. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara mendalam (deep interview). Narasumber dari penelitian ini adalah pejabat Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang mengelola BLC di Kota Surabaya dan instruktur BLC. Data hasil penelitian adalah : (a) BLC sudah dimanfaatkan oleh masyarakat diantaranya untuk kegiatan pembelajaran maupun mengakses internet. Dikarenakan keterbatasan ruangan dan jadwal pelayanan di BLC yang mengikuti jam kerja yaitu mulai jam 08.00 hingga 16.00 sehingga jumlah masyarakat yang bisa ikut pembelajaran maupun mengakses internet di BLC menjadi sedikit, meskipun di beberapa BLC melayani masyarakat hingga pukul 21.00 WIB. Pengamanan perangkat pada tiap BLC belum memadai karena tergantung pada personel pengamanan dimana lokasi BLC tersebut berada seperti di Kecamatan atau Kelurahan; (b) Terdapat satu BLC yaitu BLC Made yang berdiri mulai tahun 2013 yang selalu mengalami peningkatan pengunjung hingga Agustus 2014, hal tersebut tidak terjadi di semua BLC yang sama-sama berdiri mulai tahun 2013 yaitu BLC Taman Prestasi, BLC Taman Flora, BLC Penjaringan Sari, BLC Urip Sumoharjo dan BLC Tanah Merah 1.

4. PREDIKSI PERTUMBUHAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA KECIL MENENGAH & OMSETNYA

Keberhasilan pengelolaan TIK di dalam suatu Kota/Kabupaten diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM). UKM juga sangat berperan dalam penciptaan nilai tambah nasional, pada tahun 2012, UKM di Jawa Timur menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 54,48 % dari total PDRB Jawa Timur. Penelitian dilakukan di Kota/Kabupaten penerima ICT Pura (Surabaya, Lamongan, dan Blitar) dan belum menerima ICT Pura (Bangkalan, Situbondo, dan Probolinggo). Pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara mendalam kepada pemilik UKM. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, (a) Terjadinya peningkatan pada tingkat penetrasi internet di suatu wilayah belum tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan volume produk dan omset dari UKM. Meskipun penetrasi internet pada suatu wilayah menurun, volume produk dan omset UKM tetap meningkat; (b) Pada umumnya di semua wilayah penelitian, mayoritas UKM mengalami peningkatan pada volume produk dan omset UKM. Tetapi hal itu tidak terjadi pada Kabupaten Lamongan yang mayoritas UKM mengalami stagnan pada jumlah volume produk dan omsetnya; (c) Dari hasil penelitian tersebut, masa depan UKM masih terbelang cerah karena selain peningkatan volume produk dan omset, prospek usaha juga akan meningkat dalam tahun-tahun kedepan.

5. SURVEI AKSES DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU TAHUN 2014

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: tersusunnya Buku Indikator TIK Indonesia yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran riil tentang potensi dan kemampuan TIK dalam pembangunan nasional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang berbagai kondisi yang perlu ditangani, agar kebijakan pengelolaan dan evaluasi TIK untuk pembangunan di berbagai bidang dapat lebih terarah. Penelitian survei ini dilakukan di seluruh Indonesia dan BPPKI Surabaya melaksanakan di 3 provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. Hasil temuan adalah: **Pertama**, Kepemilikan perangkat TIK mulai dari komputer, akses internet serta pemanfaatannya sampai saat ini masih rendah, hanya perangkat Hp yang mengalami peningkatan. **Kedua**, Area Hotspot sudah dikembangkan pihak swasta dan banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. **Saran**: Penambahan area Hotspot harusnya juga diikuti dengan penambahan bandwidth sehingga akses internet lebih cepat, tidak terputus putus. Di lain pihak, pemerintah hendaknya mampu mengantisipasi arah perubahan terkait dengan perkembangan TIK sehingga penyimpangan bisa diminimalisasi.

6. PEMANFAATAN MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI OLEH TOKOH AGAMA DI KABUPATEN JEMBER

Banyaknya tokoh agama khususnya di Jakarta yang memanfaatkan jejaring sosial apakah berpengaruh terhadap perilaku tokoh agama di Kabupaten Jember cukup menggelitik untuk diteliti. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui apakah tokoh agama di Kabupaten Jember memanfaatkan media TIK untuk syiar agama. Sebanyak 6 narasumber berhasil diwawancarai dengan hasil: **Pertama**, Telepon kabel dan Hp dimanfaatkan tokoh agama untuk berkomunikasi dengan umatnya. Alasannya dengan menggunakan kedua media TIK ini tokoh agama tahu siapa lawan bicaranya. **Kedua**, Pemanfaatan media jejaring sosial dapat dianggap sebagai salah satu alternative dalam kegiatan syiar tersebut. **Ketiga**, Tokoh agama di Kabupaten tidak memanfaatkan media jejaring sosial (facebook) dengan alasan bertemu secara langsung dan bertatap muka, maka terjalin ikatan emosional yang kuat karena umat merasa diperhatikan serta dilindungi oleh pemimpinnya.

7. MODEL KNOWLEDGE MANAGEMENT REPOSITORY SYSTEM UNTUK Mendukung IMPLEMENTASI UU KIP

Sejak disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tuntutan akan keterbukaan informasi semakin mendesak. Transparansi serta partisipasi dalam sebuah organisasi pemerintahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ketersediaan website merupakan salah satu indikator dalam mendukung transparansi penyelenggaraan negara dan pengelolaan pemerintahan (*transparency award*, 2013). Untuk itu perlu pengelolaan manajemen informasi pemerintah didalamnya. Banyak daerah yang masih belum memiliki kelengkapan dalam pembentukan PPID begitu juga dengan website khusus untuk mendukung keterbukaan informasi, perlu rekomendasi bagi mereka suatu model website PPID dengan pengelolaan manajemen repository informasi yang jelas. Knowledge Management menyediakan strategi secara keseluruhan untuk mengelola konten

egovernment dengan menggunakan alat dan teknik organisasi knowledge. Pada tulisan ini dibahas mengenai menyusun suatu model *Knowledge Management system* didalam website PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya suatu model PPID *Knowledge Management system* yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik didalam lingkungan PPID sebagai public sektor.

8. PENGETAHUAN PELAJAR PENGGUNA HANDPHONE Di KOTA MALANG TERHADAP KEBOHONGAN INFORMASI MELALUI SMS (Studi Kasus Pelajar SMA N 8 dan SMA N 4 di Kota Malang) oleh Trisnani

Tulisan ini menyajikan gambaran mengenai hasil penelitian tentang Pengetahuan Pelajar Pengguna *Handphone* di Kota Malang Terhadap Kebohongan Informasi Melalui SMS. saat ini marak penipuan melalui pesan singkat modusnya bervariasi ada oknum yang meminta pulsa, iming-iming mendapatkan hadiah, dan uang tunai jumlahnya jutaan rupiah. Kebohongan Informasi tersebut bisa saja menjerumuskan para pelajar sehingga bisa saja pelajar kena tipu daya oknum pengirim SMS yang pesannya berisi penipuan. Rumusan masalahnya sejauh mana pengetahuan pelajar terhadap kebohongan informasi melalui SMS dan sejauh mana pelajar memahami informasi yang dikirimkan melalui SMS serta bagaimana sikap para pelajar terhadap kebohongan informasi melalui SMS. Dengan metode survei penelitian ini, untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan Pelajar Pengguna *Handphone* di Kota Malang Terhadap Kebohongan Informasi Melalui SMS. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pelajar sebagian besar mengetahui bahwa kebohongan informasi melalui SMS adalah merupakan kejahatan, pelajar Pengguna *Handphone* di Kota Malang rata-rata mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan lewat SMS adalah merupakan modus penipuan. Sikap pelajar tidak akan melaporkan ke pihak yang berwajib namun kasus penipuan akan dibicarakan dengan keluarga, teman, masyarakat sekitar. Dengan harapan supaya mereka tahu bahwa kebohongan informasi merupakan kejahatan dan tidak kena tipu daya oknum pengirim pesan



9. PENELITIAN MENGENAI TINGKAT KEPEDULIAN DALAM PENGAMANAN DATA PADA DINAS PEMERINTAHAN DI KOTA MADIUN *Suryo Setiyo Kardono ST. MT*

Data merupakan salah satu aset yang penting bagi kinerja suatu institusi, demikian juga bagi dinas pemerintahan di kota Madiun, akan tetapi belum diketahui bagaimana tingkat kepedulian mereka dalam pengamanan data.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengamanan data yang ada di kota Madiun, sampai sejauh mana, masalah yang ada apa saja dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Menggunakan framework CobiT 4.1 dengan proses DS 11 sebagai alat untuk mengetahui sampai sejauh mana pengamanan data di Pemkot Madiun.

Dari situ dapat diketahui tingkat pengamanan data di pemkot Madiun serta masalah yang ada serta bagaimana solusi yang harus dilakukan

10. APRESIASI MASYARAKAT JAWA TIMUR TERHADAP PROFESIONALISME JURNALIS

(Studi Tentang Penilaian Dan Penghargaan Tokoh Masyarakat Jawa Timur Terhadap Profesionalisme Jurnalis)

Jurnalisme independen adalah merupakan jurnalisme yang profesional. Jurnalis profesional merupakan prasyarat mutlak untuk membangun *kultur* pers yang sehat. Sedangkan Pers yang sehat Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, "jika pers memenuhi tiga parameter mutlak. yaitu; (1) media harus memiliki idealisme, (2) media harus merupakan industri yang sehat dan (3) memiliki orientasi yang sehat pula. Berkait dengan itu perlu dilakukan penelitian apresiasi tokoh masyarakat Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana penilaian dan penghargaan tokoh masyarakat Jawa Timur terhadap konsep pers sehat. Secara teoriitis dan konseptual jurnalis profesional mengacu pada kemampuan (*skill*) dan pekerjaan (*profession*). Untuk memeriksa apakah seorang jurnalis *profesional* atau tidak, dilihat dari *skillnya* disamping kemampuannya memahami Kode Etik Jurnalistik.

Penelitian apresiasi tokoh masyarakat menggunakan pendekatan kualitatif dengan memilih secara purposive 5 tokoh masyarakat sebagai apresiator, antara lain : (1) Tokoh Pers; (2) Budayawan; (3) Tokoh Politik; (4) Tokoh Intelektual/kalangan akademisi; (5) Tokoh Agama di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan jurnalis Indonesia relatif cukup baik, jika dilihat dari kemampuan menuliskan dan penyajian beritanya, berita disajikan dengan baik sesuai dengan kaedah tata bahasa dan kalimat-kalimat yang jelas dan tegas, bukan kalimat yang mengambang, rancu, bias, multi tafsir atau salah tulis. Jadi jika dilihat dari tata cara penulisannya sudah

relatif cukup nagus. Hanya masalahnya jika dilihat dari profesionalisme jurnalis, terutama jika dilihat dari sisi kode etik jurnalistik, utamanya mengenai *independensi* jurnalis masih kentara dan terasa tidak profesional, karena pers dinilai kurang memiliki idealisme terutama jika dilihat dari sikap independensi serta motivasi media dalam menyiarkan produksi media. Independensi terasa sangat kurang, ketika menyaksikan televisi pada saat pemilihan Presiden beberapa waktu lalu, dimana media elektronik terasa dan kentara sekali ada pemihakkan/tidak memiliki sikap netralitas.

11. PENGARUH INFOTAINMENT TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWI SMA SURABAYA

(Studi Kualitatif Pengaruh Terpaan Media Pada Program Acara Infotainment Terhadap Prestasi Belajar Siswi SMA Komplek Studi Kasus di SMA 1 SURABAYA)

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh infotainment terhadap prestasi belajar siswi SMA Komplek Surabaya. Fakta mengatakan bahwa setiap harinya infotainment menguasai 14 jam dari seluruh jam tayang siaran televisi di Indonesia. Parahnya lagi, jam-jam tayang infotainment adalah jam anak-anak, sehingga anak-anak bisa ikut menonton siaran tersebut tanpa disensor.

Yang menjadi persoalan, adalah televisi saat ini kurang berpihak pada kepentingan publik. Atas nama *rating* dan iklan, mayoritas stasiun TV memomorsekian aspek dampak negatifnya. Dan bisa ditebak akibatnya, masyarakat menjadi korban karena dibiarkan menyaring sendiri tayangan mana yang layak ditonton, dan mana yang tidak layak. Hal yang sama juga terjadi pada acara *infotainment*, yang sudah menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga dan *remaja perempuan*. Konstruksi pemirsas *infotainment* dibangun berdasarkan *stereotipikasi* terhadap sifat perempuan yang suka *bergosip*.

Sehungan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang kebenaran anggapan orang tentang Infotainment merupakan virus baru yang telah meracuni masyarakat, terutama kalangan remaja khususnya remaja putri, dimana kalangan remaja putri disamaartikan dengan anak usia sekolah SMA, maka perlu dilakukan penelitian tentang 'Pengaruh *Infotainment* Terhadap Proses dan Prestasi Belajar Siswi SMA di Surabaya "Studi Kualitatif Pengaruh Terpaan Media Pada Program Acara Infotainment Terhadap proses dan prestasi Belajar Siswi SMA Komplek Surabaya Studi kasus di SMA 1 Surabaya. Dengan rumusan masalah : (1) Apakah benar program acara *infotainment* sebagai virus baru yang meracuni remaja putri khususnya siswi SMA, sehingga berpengaruh terhadap proses dan prestasi belajar siswi SMA? (2) Jika berpengaruh sejauh mana pengaruhnya terhadap proses dan prestasi belajar nerek? (3) Jika tidak berpengaruh bagaimana solusi siswi SMA dalam menghadapi gencarnya tayangan *infotainment* di

tevisi tersebut, dan bagaimana pula peran orang tua siswi ikut terlibat dalam pembimbingan siswi dalam belajar di rumah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh apapun dari program acara *infotainment* terhadap proses dan prestasi belajar siswa SMA Komplek. Siswi SMA Komplek menganggap *infotainment* tidak bermanfaat bagi dirinya sebagai pelajar, jadi secara tidak sengaja para siswi bisa membedakan antara yang penting dan yang tidak penting, baik yang ditonton dan yang tidak ditonton untuk dikonsumsi. Jadi mereka bisa menyaring sendiri tanpa merasa menjadi korban, tamengnya adalah diri sendiri, maka secara teoritis hasil penelitian ini dapat dikatakan mengacu pada teori Proses Selektif, dimana masing-masing-siswa menyeleksi program acara mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat.

BPPKI YOGYAKARTA

1. RANCANGAN SISTEM INFORMASI LOGBOOK BPPKI YOGYAKARTA

Penulisan logbook (catatan harian pekerjaan) secara manual oleh pegawai BPPKI Yogyakarta menimbulkan kelemahan diantaranya, yaitu keamanan data, tempat penyimpanan dan tidak dapat dibawa kemana-mana (mobile). Dengan pembuatan rancangan sistem informasi elektronik logbook (e-logbook) diharapkan memudahkan dalam pembangunan aplikasi e-logbook sehingga dapat mengurangi permasalahan yang ditimbulkan akibat penulisan logbook secara manual tersebut. Metode yang digunakan dalam perancangan e-logbook menggunakan metode konstruktivitis dimana pada operasionalnya menggunakan metode kualitatif. Dalam aplikasinya e-logbook dapat mengurangi kelemahan yang ada meskipun masih belum sempurna terutama karena batasan permasalahan hanya pada Kantor BPPKI Yogyakarta. E-logbook diharapkan dapat menjadi monitoring bagi atasan pada pegawai dibawahnya yang dilakukan setiap hari kerja.

2. MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KAMPANYE PILPRES 2014 OLEH BUDIYONO

Penelitian ini mengenai fenomena komunikasi politik dalam media sosial *facebook*. Persoalannya media sosial yang dibangun untuk menumbuhkan rasa pertemanan dalam pergaulan sosial, kini berkembang ke ranah politik dan berujung tumbuhnya pertarungan kepentingan politik melalui bahasa yang digunakan. Penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan media social cukup potensial sebagai sarana komunikasi politik. Tetapi hal yang memprihatinkan, pengguna sering tidak mentaati etika berkomunikasi. Bahasa semestinya menjadi alat komunikasi yang baik, justru dimanfaatkan untuk menyerang, mengejek, merendahkan dan hal-hal yang destruktif. Perspektif ke depan, media social dapat dikembangkan

sebagai media komunikasi politik lebih baik dengan penggunaan etika komunikasi yang baik. Guna menangkal penggunaan media social yang buruk dan rawan berdampak konflik, maka upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Kemkominfo bekerjasama dengan berbagai pihak, dalam program sosialisasi penggunaan Internet Sehat dan Aman, hendaknya terus dikembangkan.

3. PENGEMBANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH UNTUK Mendukung Keterbukaan Informasi Publik oleh Daru Nupikso

Penelitian ini mengambil fokus pada muatan Informasi Publik dalam Situs web Pemerintah Daerah yang menurut amanat UU KIP jenis Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya dipublikasi melalui situs web resmi pemerintah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi UU KIP dalam situs web Pemerintah Daerah (pemda), yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Apakah ada perbedaan antara situs web yang dikelola Pemda yang pernah meraih penghargaan dengan yang tidak memperoleh penghargaan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU KIP dalam situs web pemerintah daerah dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum muatan informasi publik yang ditampilkan dalam situs web pemerintah masih rendah, meskipun beberapa situs web memperoleh poin tinggi dalam beberapa indikator. Terdapat perbedaan signifikan antara situs web yang pernah menerima penghargaan bidang TIK dengan yang belum pernah menerima penghargaan.

4. PENGUKURAN KESUKSESAN E-OFFICE PEMERINTAH DAERAH DENGAN MODEL DELONE & MCLEAN OLEH MITA INDRIANI, INASARI WIDIYASTUTI, AGUS PRABOWO, DARU NUPIKSO, RM AGUNG HARIMURTI, SUWARTO

Implementasi e-office memiliki peran penting dalam pemerintahan elektronik (e-government) di bidang administrasi. Pentingnya implementasi e-office ini disadari oleh Kementerian PAN dan RB dengan menjadikan implementasi e-office sebagai salah satu program percepatan birokrasi. Untuk itu diperlukan penelitian untuk mengetahui tingkat kesuksesan implementasi e-office di pemerintah daerah dan juga faktor yang mempengaruhi kesuksesan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuisisioner ke Pemkot Yogyakarta, Pemkab Demak, Pemkot Pekalongan, dan Pemkab Jembrana dengan metode cluster-purposive-random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesuksesan implementasi e-office di keempat daerah tersebut hampir sama. Adapun faktor determinan dari masing-masing daerah tidak sama karena keempat daerah tersebut memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda dalam implementasinya.

5. KECENDERUNGAN KONTEN BERITA KAMPANYE PEMILU PRESIDEN 2014 DI MEDIA CETAK (ANALISIS ISI TERHADAP SURATKABAR HARIAN KOMPAS DAN KORAN SINDO) OLEH: EMMY POENTARIE

Penelitian ini dilatarbelangi oleh adanya tuntutan agar media massa berkinerja secara profesional, independen dan obyektif dalam pemberitaan kampanye Pemilu Presiden 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* terhadap Surat kabar Kompas dan Koran Sindo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang pemiliknya mempunyai afiliasi terhadap parpol maupun mendukung kandidat tertentu dalam pemberitaannya tidak proporsional cenderung berat sebelah, tidak obyektif dan tidak netral. Media cenderung dipergunakan untuk mendongkrak popularitas kandidat sekaligus untuk menenggelamkan pesaingnya.

Tidak mudah menjaga obyektivitas dan independensi media cetak dalam melaksanakan salah satu fungsinya yakni melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui pemberitaan kampanye Pemilu Presiden 2014. Kinerja media massa yang proporsional, netral dan obyektif dalam pemberitaannya terkait dengan Kampanye Pemilu Presiden 2014, akan memberikan kontribusi pencerahan terhadap khalayak terkait dengan visi, misi dan program kerja kandidat. Pada ketikanya akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khalayak dalam menentukan pilihan politiknya. Untuk itu media dituntut tetap berpegang teguh pada esensinya agar tidak terkooptasi kepentingan politik tertentu, proporsional dalam menyajikan berita dan sadar fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, kontrol dan perekat sosial dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas.

Dalam kaitan ini perlu kiranya Subdirektorat Media Cetak, Direktorat Pengelolaan Media Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, memberi dukungan agar media senantiasa menyajikan berita yang berkualitas, obyektif dan netral, sehingga dapat mendorong terwujudnya independensi media dalam pemilihan umum.

6. URGENSI NBP DAN HDI DALAM MENDORONG PENETRASI BROADBAND DI INDONESIA HASIL PENELITIAN MANDIRI DENGAN JUDUL "FAKTOR EMPIRIS PENDORONG PENETRASI BROADBAND PADA TINGKAT EKONOMI BERBEDA" OLEH INASARI WIDIYASTUTI

Teknologi broadband telah menjadi trend komunikasi global yang dianggap memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Isu ini memicu banyak negara untuk menerapkan strategi adopsi yang mendorong penetrasi broadband. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor empiris yang mendorong penetrasi broadband ditinjau dari faktor ekonomi, sosial, demografi, regulasi, dan teknologi. Dengan

pendekatan data panel pada tiga teknik estimasi model diketahui bahwa GDP per kapita, laju angkatan kerja, HDI, regulasi, dan penetrasi internet memiliki tingkat signifikansi tinggi dan berkorelasi positif terhadap laju penetrasi broadband. HDI, regulasi, dan penetrasi internet menjadi variabel kunci yang mendorong penetrasi broadband. Ketersediaan regulasi akan mendorong penetrasi broadband hingga 0,54%. Hasil ini mengindikasikan pentingnya kebijakan yang mampu menstimulasi penetrasi broadband sehingga berimpak pada produktivitas nasional. Regulasi lebih diutamakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia bukan berfokus pada infrastruktur. Dimana, HDI mendorong penetrasi broadband hingga 27, 04%.

7. PENGARUH LITERASI DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PUSAT LAYANAN INFORMASI KECAMATAN (PLIK) OLEH MITA INDRIANI

Salah satu program Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika cq Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Kesuksesan PLIK dalam masyarakat tidak hanya bergantung dari penyediaan infrastruktur saja, namun dipengaruhi juga oleh tingkat literasi masyarakat disekitarnya. Sehingga penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi dalam mempengaruhi kesuksesan PLIK. PLIK Bambanglipuro dipilih sebagai lokasi penelitian karena PLIK ini telah dinilai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil dengan memberikan penghargaan USO award pada tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada para pengguna PLIK Bambanglipuro dengan metode *accidental sampling*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat literasi pengguna PLIK terbukti secara signifikan mampu mempengaruhi kesuksesan PLIK.

8. ANALISIS ISI SURATKABAR DAERAH TENTANG KENAIKAN HARGA GAS ELPIJI OLEH: TOPOHUDOYO

Respon atas kebijakan yang disampaikan masyarakat pada dasarnya merupakan sebuah opini publik. Opini publik merupakan suatu proses yang menggabungkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan usulan-usulan yang dinyatakan oleh pribadi warga negara terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertugas untuk mencapai ketertiban sosial.

Atas polemik yang berkembang mengenai kenaikan harga Gas elpiji menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diperoleh informasi jelas dan lengkap terhadap permasalahan kenaikan harga Gas elpiji tersebut, khususnya untuk melihat aspirasi (opini) masyarakat sebagai perwujudan dari penggunaan hak politik mereka. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat atas kenaikan gas elpiji non subsidi.

Hasilnya diketahui bahwa respon masyarakat antara yang positif dan negatif cukup berimbang (49% berbanding 48%). Surat kabar daerah cukup berimbang dalam penggunaan sumber berita dalam memberitakan polemik kenaikan harga gas elpiji. Demikian halnya dalam menyampaikan respon masyarakat, surat kabar daerah cenderung berimbang antara berita yang positif yakni mendukung kenaikan gas elpiji dan berita-berita yang negatif atau yang menolak kenaikan harga gas elpiji.

9. GOTOSOVIE.COM: MENGEMBANGKAN BRAND LOKAL DALAM E-BUSINESS OLEH NOVIAN ANATA PUTRA

Gotosovie adalah sebuah *brand* tas wanita lokal asli dari Kecamatan Godean, Sleman, DIY yang berhasil memanfaatkan internet untuk membangun *brand* dan bisnisnya. Memberdayakan pengrajin tas dari Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, DIY, Winda dan Andi mampu memulai bisnis ini dengan modal tidak lebih dari 3 juta rupiah. Kesuksesan mengembangkan *brand* dan bisnis online ini yang coba dibedah oleh peneliti. Penelitian konstruktivisme ini mencoba menggunakan pendekatan ekonomi politik, dimana termasuk pada rumpun paradigma kritis. Pendekatan ekonomi politik yang merupakan turunan pemikiran Marx, biasa digunakan untuk membongkar kapitalisme dari para pemilik modal besar untuk menguasai pasar. Hasilnya unik, semua proses bisnis online yang dilakukan gotosovie.com dapat bagi habis kedalam 3 pintu masuk ekonomi politik: komodifikasi, spesialisasi, dan strukturasi. Temuan ini yang membuat peneliti menyimpulkan bahwa saat ini kapitalisme tidak hanya bisa dilakukan oleh pengusaha besar saja, namun nyatanya dengan memanfaatkan internet, pengusaha dengan modal terbataspun mampu melakukannya untuk menguasai pasar.

10. EVALUASI KEPUASAN PELANGGAN SISTEM WI-FI DENGAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DAN CUSTOMER SATISFACTION INDEX Oleh Vieka Aprilia Intanny

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan, Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JTETI) Fakultas Teknik UGM telah menyiapkan sarana dan prasarana yang sangat memadai untuk mendukung penyelenggaraan program studi yaitu meliputi bangunan sampai akses wifi 24 jam. Evaluasi tingkat kepuasan pengguna sistem Wi-Fi perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan melihat tingkatan kesenjangan antara kualitas pelayanan yang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan. Pada penelitian ini digunakan indeks kepuasan pengguna (*Customer satisfaction index*) dan *Importance-Performance Analysis* untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan jaringan wifi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna puas terhadap kinerja yang dilakukan pengelola Wi-Fi UGM. Atribut yang dianggap memiliki tingkat kepuasan yang tinggi yaitu kecepatan transfer data, kecepatan akses



ke internet, stabilitas koneksi, dan kecocokan jenis perangkat.

11. REPRESENTASI FEMINISME LIBERAL DALAM SINETRON: KAJIAN SEMIOTIKA TERHADAP SINETRON KITA NIKAH YUK OLEH NUR ZAINI

Penggambaran tentang perempuan yang menderita sudah banyak ditemui dalam sinetron-sinetron di Indonesia. Adapun penggambaran tentang perempuan yang bekerja di kantor, tegas dan mandiri seperti Mawar dalam sinetron *Kita Nikah Yuk* (KNY) episode 1 dan 2 masih jarang diangkat dalam sinetron sebelumnya. Permasalahan yang diungkap bagaimana representasi feminisme liberal dalam sinetron KNY. Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan representasi feminisme liberal dalam sinetron tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotika C.S. Peirce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi feminisme liberal dalam sinetron tersebut mencakup lima hal antara lain perempuan bukan kelompok marginal, perempuan bukan kelas kedua, perempuan juga berpikir secara cerdas, kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta perempuan tidak lemah. Kelima representasi tersebut terlihat melalui penampilan tokoh Mawar dan Mirna. Pemilihan tema seperti dalam sinetron KNY episode 1 dan 2 perlu dipertahankan dan diikuti oleh pembuat sinetron lainnya agar sinetron tidak hanya sebagai tontonan melainkan juga sebagai tuntunan atau bersifat mendidik. Direktorat Penyiaran, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo perlu memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pembuat sinetron terkait dengan tema yang mendidik.



BBPPKI MAKASSAR

1. SURVEI AKSES DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU DI WILAYAH KERJA BBPPKI MAKASSAR OLEH TIM PENELITI BBPPKI MAKASSAR

Penelitian ini melakukan survei terhadap akses dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di rumah tangga dan individu di wilayah kerja BBPPKI Makassar yaitu Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Indikator TIK yang disurvei adalah radio, televisi, telepon tetap, telepon seluler, komputer dan internet. Survei dilakukan kepada 1488 orang yang dipilih secara acak dengan systematic sampling. Hasil survei menunjukkan bahwa dari enam sektor TIK yang diteliti, hanya ada dua sektor TIK yang banyak dimiliki oleh masyarakat yaitu Televisi (70,52%) dan Telepon Seluler (70,11%), sedangkan Radio, Komputer dan Akses Internet tergolong masih sedikit (berkisar 15–25%) bahkan akses telekomunikasi melalui telepon kabel sangat sedikit sekali (3,36%).

2. PERAN PROGRAM DESA INFORMASI DALAM PENINGKATAN LITERASI MEDIA PADA MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN PAPUA DAN NUSA TENGGARA TIMUR OLEH TIM PENELITI BBPPKI MAKASSAR

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, mengamanatkan bahwa masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada 2015-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan, merupakan syarat utama dan harus

dimanfaatkan secara optimal. Kenyataan yang ada saat ini disparitas ketersediaan infrastruktur di wilayah perbatasan Papua dan Nusa Tenggara Timur masih besar. Begitu pula dengan tingkat melek/literasi media di wilayah perbatasan relatif masih rendah. Karena itu Kementerian Kominfo membangun Program Desa Informasi di wilayah perbatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran program desa informasi dalam peningkatan literasi media masyarakat di wilayah perbatasan Papua dan NTT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran program Desa Informasi di wilayah perbatasan Papua dan Nusa Tenggara Timur belum maksimal atau tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari banyaknya item program ini yang tidak berjalan maksimal seperti PLIK/MPLIK, Radio Komunitas serta Televisi Digital, bahkan beberapa diantaranya sudah tidak berjalan sama sekali. Meski demikian literasi untuk 4 media yang diteliti (televisi, telepon seluler, internet dan radio) tetap bisa berjalan, karena masyarakat yang berada di wilayah perbatasan sudah tersentuh dengan kemajuan teknologi tersebut hanya saja memiliki tingkat literasi berbeda-beda. Hasil ini juga menggambarkan bahwa masyarakat sangat literat terhadap media televisi berada pada level 3 (menengah). Bahkan televisi telah menjadi media utama bagi masyarakat di wilayah perbatasan Papua dan NTT. Media kedua adalah telepon seluler berada pada level 3 (menengah). Mayoritas responden sangat melek teknologi ini meski kebanyakan sebatas menelepon dan ber SMS saja. Sementara untuk internet, literasi media masyarakat berada ada level 1 (sangat rendah) dan radio berada pada level 0. Kedua media ini yang paling sedikit dan jarang dimanfaatkan responden karena infrastruktur jaringan internet yang belum memadai dan tidak memiliki radio untuk dimanfaatkan sebagai media informasi dan hiburan.

3. KREDIBILITAS KOMUNIKASI POLITIK CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI 2014 (SURVEI DI KOTA MAKASSAR, PARE-PARE DAN PALOPO) OLEH TIM PENELITI BBPPI MAKASSAR

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia setiap 5 tahun. Kenyataan yang ada saat ini, masyarakat wajib memilih semakin berkurang atau angka golput semakin meningkat. Salah satu alasan karena pemilih tidak percaya terhadap figur-figur calon presiden/calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kredibilitas komunikasi politik calon presiden/calon wakil presiden RI 2014 berdasarkan penilaian masyarakat kota Makassar, Pare-Pare dan Palopo. Adapun kredibilitas komunikator yang diukur dalam penelitian ini adalah, daya tarik (fisik dan kepribadian), kepercayaan, keahlian dan kesukaan. Sedangkan komunikasi politik diukur berdasarkan proses produksi pesan, isi pesan dan efek pesan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jusuf Kalla mendapatkan penilaian tertinggi dari responden terhadap daya tarik dirinya (fisik dan kepribadian) dan dapat dipercaya sebagai calon wakil presiden. Sedangkan untuk variabel keahlian, calon presiden Joko Widodo mendapat penilaian tertinggi dari responden. Mayoritas responden juga sangat menyukai sosok Jokowi. Kebanyakan responden menggunakan televisi, surat kabar dan internet untuk memperoleh informasi pilpres. Sedangkan untuk variabel isi pesan, Prabowo-Hatta Rajasa dalam penyampaian pesan-pesan politiknya banyak mengangkat tema ekonomi-kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan dan pendidikan. Sementara pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sering menyampaikan tema pendidikan, pertahanan keamanan dan pluralism. Responden juga menilai efek pesan Jokowi-Jusuf Kalla lebih unggul dibanding Prabowo-Hatta Rajasa karena memiliki pesan yang sangat menarik perhatian dan bisa menambah pengetahuan. Hal ini juga dianggap dapat menentukan sikap politik responden.

4. PERANCANGAN RUTE ALTERNATIF KEMACETAN DI KOTA MAKASSAR BERBASIS GOOGLE MAP OLEH NUR ALAM

Kemacetan merupakan permasalahan besar yang sering terjadi di kota-kota besar termasuk di Makassar. Kerugian akibat kemacetan tersebut sangatlah besar sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasi dan mengurainya. Salah satu pendekatan yang bisa dipakai dalam mengatasi/mengurai kemacetan tersebut adalah melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa rancangan sistem informasi dengan memanfaatkan *Google Map*. Dalam rancangan ini digunakan metode *Waterfall system* yang mengadopsi siklus hidup pengembangan sistem informasi melalui tahapan analisis kebutuhan sistem, desain sistem dengan UML, implementasi dan pengujian dengan menggunakan *Black Box testing*. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat dipakai untuk menyampaikan

informasi koordinat kemacetan dan rute alternatif untuk menghindarinya dengan memanfaatkan *Google Map*.

5. OPTIMASI PEMBAGIAN RUTE OPERASI PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN BERGERAK DI LUWU TIMUR OLEH Mukhlis Amin

Bantuan *Mobile* Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) diberikan kepada setiap Kabupaten/Kota untuk melayani masyarakat di seluruh kecamatan, namun jumlah MPLIK yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah kecamatan di setiap daerah. Penelitian ini melakukan optimasi pembagian rute operasi MPLIK untuk mencari solusi pembagian rute terbaik agar dapat melayani masyarakat secara keseluruhan di wilayah kerjanya secara efektif dan efisien. Pembagian wilayah layanan dilakukan dengan menggunakan algoritma *k-means* sedangkan pencarian rute terbaik dilakukan dengan menerapkan algoritma koloni semut. Hasil penentuan rute dan siklus jadwal pelayanan MPLIK menunjukkan bahwa siklus layanan pada masing-masing kelompok agar seluruh desa dapat dilayani memungkinkan untuk dilakukan dalam 5 – 6 hari pelayanan dengan rata-rata waktu pelayanan (*online*) setiap desa dalam satu kilometer adalah 1 – 3 jam.

6. ANALISIS E-SERVICE PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT WILAYAH MAMMINASATA OLEH TASMIL

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran kondisi *e-service* kabupaten/kota kawasan Mamminasata. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan wawancara dan FGD dalam mengumpulkan data. Untuk mengukur kondisi *e-service* kabupaten/kota kawasan Mamminasata digunakan model P3I3 (*Policy, Process, People, IT Preparedness, Infrastructure, IT Benefit*). Hasil penelitian menunjukkan, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi dalam menerapkan *e-service* baik dari aspek kebijakan, proses, kesiapan IT, Infrastruktur maupun kesiapan SDM untuk kabupaten/kota kawasan Mamminasata

7. INFRASTRUKTUR TIK PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN E-GOVERNMENT DI KAWASAN MAMMINASATA OLEH HERMAN

Terbitnya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 sebagai pedoman untuk pelaksanaan dan pengembangan e-government belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sampai dengan saat ini terlebih di daerah. Ada banyak alasan yang dikemukakan sebagai kendala dalam mengimplementasikan e-government, salah satunya adalah infrastruktur. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang kondisi nyata Infrastruktur di bidang TIK yang telah dimiliki pemerintah daerah dalam mendukung e-Government di wilayah Mamminasata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Maros menjadi yang memiliki infrastruktur yang paling siap untuk mengimplementasikan e-Government dibandingkan ketiga wilayah mamminasata lainnya seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Untuk pembangunan infrastruktur di Kota Makassar baru memulai namun sudah memperlihatkan progres yang positif, Namun berbanding terbalik dengan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar dimana arah kondisi infrastruktur dalam pengembangan e-Government tidak berjalan.

Hal ini lebih disebabkan karena faktor kebijakan dari masing-masing daerah. Salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak adanya kebijakan baik dari sisi regulasi dan penganggaran karena tidak adanya pemahaman yang baik tentang TIK dikalangan para pejabat publik di daerah.

8. KESIAPAN E-SKILLS PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KAWASAN MAMMINASATA OLEH FIRDAUS MASYHUR

Aspek penting dalam pengembangan eGov di Indonesia adalah sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi (*e-Skill*) dan kompeten dalam mengimplementasikan konsep-konsep pelayanan berbasis elektronik. Kombinasi Parameter SKKNI yang dipetakan ke dalam *ICT user skills*, *ICT practitioner skills*, *e-business skills* menghasilkan konsep keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah akan SDM di bidang kominfo (*Government ICT Skills*). Penelitian ini menggambarkan kesiapan SDM bidang TIK yang dilaksanakan menggunakan strategi survei dengan populasi pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lingkup pemerintah daerah yang tersebar di 4 wilayah dalam kawasan Mamminasata yaitu Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesiapan *e-Skills* di Kawasan Mamminasata berada pada indeks 52% yang berarti SDM memahami dan siap dalam pemanfaatan dasar TIK, memahami operasional TIK, memiliki pengetahuan teknis, serta mampu mengeksplorasi penggunaan TIK pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pemerintah.

9. LITERASITEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI KAWASAN MAMMINASATA OLEH BASO SALEH

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masyarakat di kawasan Mamminasata. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat di kawasan Mamminasata relatif masih rendah. Mayoritas masyarakat masih berada pada level 0, yaitu masyarakat yang sama sekali belum memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal penggunaan

TIK. Namun demikian, sudah ada masyarakat yang berada pada level yang lebih tinggi. Bahkan sudah ada sebagian kecil masyarakat yang berada pada level tertinggi (level 5), yaitu masyarakat yang aktivitasnya sudah sangat tergantung pada penggunaan TIK. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengguna TIK di kawasan Mamminasata belum merata, yaitu masih didominasi oleh kelompok usia muda dan kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi. Terkait dengan rencana pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata, maka penelitian ini merekomendasikan agar dilakukan upaya-upaya peningkatan literasi TIK masyarakat secara merata, baik dari aspek usia maupun pendidikan. Hal ini penting agar program yang terkait dengan pelayanan masyarakat yang berbasis TIK dapat lebih lancar dan optimal. Hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat literasi TIK masyarakat, diantaranya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana TIK. Oleh karena itu, diharapkan agar rencana tata ruang kawasan Mamminasata juga termasuk rencana mengintegrasikan sarana dan prasarana TIK.

10. DIALEK KONJO SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI ANTAR PEMERINTAH DENGAN MASYARAKAT KAWASAN AMMATOA TANA TOA KAJANG BULUKUMBA OLEH RUKMAN PALA

Penelitian ini menelusuri fenomena proses komunikasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang *settingnya* berbasiskan pada *dialek konjo*. Penelitian menunjukkan bahwa *dialek konjo* merupakan bentuk proses komunikasi lisan non media yang keberlangsungannya bisa dalam *setting* interpersonal maupun kelompok. Partisipasi komunikasi berbasis *dialek konjo* dalam realitasnya bersifat lokal (khusus), dilakukan komunitas suku Kajang di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba saja. Proses komunikasi tersebut terikat dengan pesan komunikasi yang disebut *Pasang ri Kajang*. Makna isi dari *Pasang Ri Kajang* yaitu "Pesan, wasiat, amanat". Pemerintah melakukan komunikasi dengan masyarakat kajang dengan menggunakan dialek konjo dengan mematuhi ketentuan yang diperlakukan dikawasan tanah adat desa Tanatoa diantaranya, pakaian yang digunakan komunikator adalah pakaian hitam, hitam putih. Tanpa menggunakan pakaian ini tidak diperkenankan untuk masuk diwilayah adat dan tidak diperkenankan sampai pada sore hari menjelang malam. Selanjutnya bila terjadi proses komunikasi diantara partisipan yang dalam hal ini adalah pemerintah dan non pemerintah maka secara konektif dapat diterima sebagai bentuk *pengenalan dan pencerahan*. Tetapi secara apektif sebegini besar dapat dipahami atau dimengerti masyarakat maksud dan tujuan pemerintah dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat. Namun, untuk diimplementasikan hal itu yang menjadi sulit khususnya ditinjau kawasan adat Ammatoa karena masyarakat tidak menerima hal-hal yang berkaitan dengan modernisasi dikawasan tanah adat. Singkatnya, hal-hal yang sifatnya di luar *Pasang ri Kajang* pasti di tolak masyarakat Konjo.

11. PERAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DALAM DISEMINASI INFORMASI NASIONAL MELALUI MEDIA ONLINE OLEH RACHMAWATY DJAFFAR

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan diseminasi informasi nasional menjadi sangat strategis karena posisi pemerintah daerah yang sangat dekat dengan masyarakat luas. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang peran pemerintah Kota Parepare dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/per/m. Kominfo/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional khususnya melalui media online. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan strategi Survei dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*depth interview*). Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Parepare telah memiliki sejumlah media online beroperasi secara efektif memberikan informasi kepada masyarakat. Website Pemerintah Kota Parepare merupakan salah satu website pemerintah daerah yang aktif, dibuktikan dengan jumlah pengunjung ±100 kunjungan per hari. Masyarakat sudah menyadari dan telah memanfaatkan media online pemerintah untuk mendapatkan informasi terkini yang dikeluarkan oleh pemerintah kota sehingga akses informasi antara masyarakat dan pemerintah berjalan efektif.

12. MENEROPONG STASIUN JARINGAN TELEVISI DI KENDARI DALAM MEMPRODUKSI KONTEN LOKAL OLEH CHRISTIANY JUDITHA

Undang-Undang Penyiaran mengamanatkan lembaga penyiaran nasional melaksanakan Sistem Stasiun Jaringan dengan televisi lokal agar tercipta keragaman isi siaran serta memberdayakan masyarakat daerah. Kewajiban televisi lokal jaringan harus menyiarkan konten lokal minimal 10% dari total waktu siaran per hari. Kenyataannya masih banyak televisi lokal belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang produksi konten lokal di Kompas TV Kendari dan Sindo TV Kendari. Serta untuk melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memproduksi konten lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kompas TV Kendari belum mencapai 10% dalam penyiaran konten lokal sedangkan Sindo TV Kendari telah melewati 10%. Faktor-faktor pendukung kedua TV ini adalah sudah berizin siaran, SDM yang cukup dan kemampuan membuat program siaran lokal. Sedangkan faktor penghambat utama yang dihadapi kedua televisi lokal ini adalah penjualan (iklan) lokal yang relatif minim, masalah infrastruktur dan menjamurnya TV kabel yang kebanyakan tidak memasukkan siaran TV keduanya pada saluran TV kabel.

13. PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER DI KOTA KUPANG PROVINSI NTT OLEH EMILSYAH NUR

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat tentang peran media massa dalam membangun karakter bangsa khususnya di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini dilaksanakan di kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimulai dari bulan Mei sampai Agustus 2014. Metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, kuisioner serta teknik analisis data yang dipergunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 (enam) responden kunci pengelola media massa di kota Kupang yaitu : Balai Kota Kupang, Timor Express (Fajar/ Jawa Pos), Victory News, Pos Kupang, Berita Antara, dan Expo NTT. Pada dasarnya memberikan jawaban yang hampir sama yaitu pentingnya pembangunan karakter masyarakat kota Kupang dengan memelihara nilai-nilai luhur budaya setempat, memperkuat kerukunan antar umat beragama yang berbeda suku, agama dan ras. Peran media lokal sebagai fasilitator masyarakat setempat sangat penting dalam menunjang visi dan misi pemerintah kota Kupang dalam mewujudkan masyarakat kota Kupang yang berkarater lokal dan berkepribadian nasional.

14. ANALISIS PERKEMBANGAN STARTUP LOKAL (STUDI KASUS DI KOTA KENDARI TAHUN 2014) OLEH YAYAT D. HADIYAT

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat turut menumbuhkan bisnis industri kreatif yang berbasis digital. Hal ini ditandai dengan banyak berkembangnya startup lokal di Indonesia namun di sisi lain, banyak startup yang gagal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan sebuah startup khususnya di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa startup lokal tidak dikembangkan dengan serius, tidak ada rencana bisnis yang jelas, dan belum bekerja sama dengan pihak investor maupun inkubator yang dapat membantu pengembangan startup.



15. KECENDERUNGAN CALON ANGGOTA LEGESLATIF MEMANFAATKAN MEDIA SURAT KABAR DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU 2014 OLEH BAHARUDDIN DOLLAH

Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan kecen derungan Calon Anggota Legeslatif (Caleg) memanfaatkan media cetak, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu 2014. Tipe penelitain ini adalah content analysis. Penelitain ini dilaksanakan di kota Makassar. Adapun populasi pene litian ini adalah seluruh pemberitaan surat kabar Fajar dan Tribun Timur yang terbit dari bulan Januari sampai dengan tanggal 5 Mei 2014, memuat pemberitaan masalah kampanye pemilu yang dilakukan oleh para caleg dari semua partai peserta pemilu tahun 2014 yang diekspos melalui kedua surat kabar tersebut, sebanyak 76 pem beritaan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mendokumentasi seluruh pemberitaan tentang dan sekitar pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh para caleg. Data yang telah terkumpul selanjutnya decoding dan ditabulasi serta dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan para caleg memanfaatkan media cetak (surat kabar) masih rendah, dan belum siap dengan program-programnya.

16. MOTIF PENGGUNAAN TIK PADA ANAK USIA SEKOLAH DI KELURAHAN LAKKANG KEC. TALLO KOTA MAKASSAR OLEH SYARIFUDDIN

Pemerataan ICT menjadi suatu isu yang penting bagi Negara-negara didunia sehingga PBB mengambil inisatif dengan mensponsori sebuah konfrensi dibidang informasi yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ICT diantara negara-negara di dunia agar tercipta masyarakat informasi global , yakni dengan mengadakan WSIS (world summit of information society : konfrensi dunia untuk masyarakat infomasil. Selain itu telah ditetapkan tanggal 17 Mei sebagai hari masyarakat informasi sedunia. Salah satu kebijakan pemerintah yang paling segar dalam rangka mencapai sasaran-sasaran diatas adalah dengan menyelenggarakan ICTPURA. penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui motif pemanfaatan TIK pada anak usia sekolah dasar di kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar. Sebagai suatu kelurahan yang unik dan berada di dalam Kota Metro Makassar yang wilayah daratannya merupakan hasil pendangkalan dari Sungai Tallo mengakibatkan akses menuju kelurahan tersebut untuk saat ini hanya dengan menggunakan perahu. Hal ini berdampak pada wilayah kelurahan Lakkang seperti terisolir dengan wilayah lain di Kota Makassar ini. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemahaman TIK pada anak usia sekolah tidaklah merata hingga pada motifasi dalam pemanfaatan TIK yang berbeda satu sama lainnya, namun demikian pada umumnya responden menjawab bahwa pemanfaatan TIK dapat memenuhi harapannya.





KOMINFO





KOMINFO